



**STRATEGI *FAMILY DEVELOPMENT SESSION*
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA
JAGALEMPENI KECAMATAN WANASARI
KABUPATEN BREBES**

TESIS

**diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Pendidikan**

**Oleh
Iis Arfiyani
0105517002**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020**

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “Strategi *Family Development Session* Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes” karya,

Nama : Iis Arfiyani

NIM : 0105517002

Program Studi : Pendidikan Luar Sekolah

telah dipertahankan dalam sidang panitia ujian tesis Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020

Semarang, 2 Juni 2020

Panitia Ujian,

Ketua,



Sekretaris,

Yuli Kurniawati Sugiyo Pranoto, S.Psi.,M.A.,D.Sc.
NIP 198107042005012003

Penguji I,

Dr. Mintarsih Arbarini, M.Pd
NIP 196801211993032002

Penguji II,

Dr. Amin Yusuf, M.Si
NIP 196408081991031003

Penguji III,

Prof. Dr. Tri Joko Raharjo., M.Pd
NIP 195903011985111001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya

nama : Iis Arfiyani

NIM : 0105517002

program studi : Pendidikan Luar Sekolah

menyatakan bahwa yang tertulis dalam tesis yang berjudul “Strategi *Family Development Session* Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes” ini benar-benar karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini saya **secara pribadi** siap menanggung resiko/sanksi hukum yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang, 2 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,



Iis Arfiyani

NIM. 0105517002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Ketika dalam kesulitanmu, orang-orang meninggalkanmu itu bisa jadi karena Allaah sendirilah yang akan mengurusimu” (Imam Syafii)

PERSEMBAHAN

- ✿ Untuk kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan doa, cinta, pengorbanan, dukungan, serta motivasi yang begitu tulus.
- ✿ Untuk teman-teman PPS Pendidikan Luar Sekolah 2017.
- ✿ Almamater tercinta, Universitas Negeri Semarang.

ABSTRAK

Arfiyani, Iis (2020) . “Strategi *Family Development Session* Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes”. *Tesis*. Program Studi Pendidikan Luar Sekolah. Program Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Prof.Dr.Tri Joko Raharjo,M.Pd., Pembimbing II Dr. Amin Yusuf, M.Si.

Kata Kunci: *Family Development Session*, Strategi, Pemberdayaan

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis strategi pemberdayaan FDS Desa Jagalempeni. (2) Mendeskripsikan hasil capaian pemberdayaan FDS Desa Jagalempeni. (3) Menganalisis kendala FDS yang dilaksanakan oleh pendamping sosial Desa Jagalempeni. (4) Menganalisis solusi atas kendala yang dihadapi dalam kegiatan FDS di Desa Jagalempeni.

Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Metode pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan kuesioner. Dengan mengambil sampel 35 peserta FDS dan 10 informan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Validasi yang digunakan peneliti dalam menguji kebenaran data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:(1)Strategi FDS dalam pemberdayaan masyarakat Desa Jagalempeni melalui 4 tahapan yaitu, Tahap pemilihan lokasi, Tahap sosialisasi, Tahap proses pemberdayaan masyarakat dan Tahap pemandirian.(2).Keberhasilan kegiatan FDS yaitu, terjadi peningkatan pengetahuan baik pendidikan, kesehatan dan ekonomi.Komponen pendidikan, anak KPM rajin ke sekolah, Komponen kesehatan, Peserta FDS rajin membawa anaknya untuk mengecek kesehatan anaknya ke posyandu dan Komponen ekonomi adanya kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui e-waroeng bersama guna meningkatkan kemandirian finansial peserta FDS (3).Kendala yang di hadapi dalam kegiatan FDS yaitu, Kurangnya komitmen peserta, Perlengkapan FDS yang terbatas, Kurangnya sosialisasi FDS dikalangan masyarakat sekitar, Peserta FDS yang sudah mandiri tidak mau graduasi, Pendamping disibukan dengan banyaknya administrasi dan program komplementaritas.(4) Solusi atas kendala yang dihadapi dalam kegiatan FDS yaitu, pemberian sanksi tanggung renteng, mengadakan coaching FDS secara berkala, Media promosi PKH, Home visit peserta dan Monitoring yang berkualitas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kegiatan FDS di Desa Jagalempeni sudah berjalan dengan baik dan terjadi peningkatan kemandirian masyarakat baik dari sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat, Adapun kendala yang dialami dapat di atasi dengan solusi yang sudah di tawarkan untuk kemajuan kegiatan FDS. Terdapat beberapa saran yaitu *Pertama*, Bagi pemerintah tidak menaikan jumlah nominal bantuan agar tidak tumpang tindih antara besarnya bantuan dengan perubahan pola pikir masyarakat. *Kedua*,Bagi PPKH Kab.Brebes, agar melibatkan *stakeholder* lain baik tenaga pendidik, kesehatan dan ekonomi untuk mengisi kegiatan FDS.

ABSTRACT

Arfiyani, Iis.(2020).” Family Development Session Strategy in Community Empowerment in Jagalempeni Village, Wanasari District Brebes Regency”. Thesis Nonformal Education Study Program, Postgraduate Semarang State University. Adviser I: Prof.Tri Joko Raharjo, M.Pd., Adviser II: Dr.Amin Yusuf, M.Sc.

Keywords: Family Development Session, Strategy, Empowerment

This study aims to: (1) Analyze the FDS empowerment strategy of Jagalempeni Village. (2) Describe the results of the Jagalempeni Village FDS achievements. (3) Analyzing the FDS constraints carried out by Jagalempeni Village social assistance. (4) Analyzing solutions to problems encountered in FDS activities in Jagalempeni Village.

This research is a qualitative descriptive type. The method of collecting data in this study through interviews, observation, documentation and questionnaires. By taking a sample of 35 FDS participants and 10 informants to answer the problem in this study. Validation is used by researchers to test the truth of the data using triangulation of sources.

The results showed that: (1) FDS strategy in empowering Jagalempeni village community through 4 stages, namely, site selection stage, socialization stage, community empowerment process stage and self-reliance stage. (2). The success of FDS activities namely, there was an increase in knowledge of both education, health and economics. Education component, KPM children are diligent in school, health component, FDS participants diligently bring their children to check their children's health to posyandu and economic component of economic empowerment activities through joint e-waroeng in order to increase the financial independence of FDS participants (3). faced in FDS activities namely, Lack of participant commitment, limited FDS equipment, Lack of socialization of FDS among the surrounding community, FDS participants who are already independent do not want to graduate, Companion is preoccupied with the many administration and complementarity programs. (4) Solutions to the constraints faced in FDS activities, namely, sanctions tanggung renteng, hold regular FDS coaching, PKH promotion media, quality home visit participants and monitoring.

Based on the results of the study it can be concluded that the FDS activities in Jagalempeni Village have been going well and there is an increase in community independence from the education, health and community economy sectors. The constraints experienced can be overcome with the solutions that have been offered to progress FDS activities. There are a number of suggestions, namely: First, for the government not to increase the nominal amount of aid so as not to overlap the amount of aid with the change in mindset of the community. Secondly, for PPKH Kab. Brebes, to involve other stakeholders both educators, health and economics to fill FDS activities.

PRAKATA

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya. Berkat karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Strategi *Family Development Session* Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes” Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan pertama kali kepada para pembimbing: Prof.Dr.Tri Joko Raharjo,M.Pd.,(Pembimbing I) dan Dr. Amin Yusuf, M.Si. (Pembimbing II) yang telah memberikan saran dan bimbingan selama penelitian.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan juga kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penyelesaian studi, di antaranya:

1. Farid Ahmadi S.Kom., M.Kom, Ph.D. selaku kepala jurusan pendidikan luar sekolah
2. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Program Pascasarjana Unnes, yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu pada peneliti selama menempuh pendidikan
3. Kepada kedua orang tua saya Bapak Saryo dan Ibu Amyati yang telah memberikan doa dan usaha terbaik untuk peneliti.
4. Kordinator PKH, Pendamping PKH Kabupaten Brebes yang telah membantu peneliti selama proses penelitian.
5. Endang Yasonta, S.Sos, rekanan di LSPS staff Pusbangprof Peksos dan Pensos yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Ari Dwi Nur Indriawan Musyono, S.Pd., M.Pd yang sudah membimbing, membantu penulis selama menempuh pendidikan.

7. Teman-teman mahasiswa PLS angkatan 2017 Pascasarjana Universitas Negeri Semarang serta pihak-pihak lain yang telah membantu terselesainya penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti sadar bahwa dalam tesis ini mungkin masih terdapat kekurangan, baik isi maupun tulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat peneliti harapkan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan merupakan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 2 Juni 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Iis Arfiyani', with a stylized flourish at the end.

Iis Arfiyani

DAFTAR ISI

PENGESAHAN UJIAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Cakupan Masalah.....	12
1.4 Rumusan Masalah	12
1.5 Tujuan Penelitian	13
1.6 Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, DAN KERANGKA BERPIKIR	
2.1 Kajian Pustaka	16
2.2 Kerangka Teorits	24
2.2.1 Kemiskinan.....	24
2.2.1.1 Karakteristik Kemiskinan.....	29

2.2.1.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan.....	31
2.2.2 Pemberdayaan Masyarakat.....	33
2.2.2.1 Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	40
2.2.2.2 Tujuan Pemberdayaan.....	43
2.2.2.3 Prinsip Pemberdayaan.....	44
2.2.2.4 Proses Pemberdayaan.....	45
2.2.2.5 Pendekatan Pemberdayaan	48
2.2.2.6 Pemberdayaan dalam Pengentasan Kemiskinan.....	51
2.2.3 Program Keluarga Harapan	52
2.2.4 Family Development Session.....	55
2.2.4.1 Modul Family Development Session.....	56
2.2.4.2 Tujuan Family Development Session... ..	64
2.2.4.3 Tempat Pelaksanaan Family Development Session	66
2.2.4.4 Waktu Pelaksanaan Family Development Session	66
2.2.4.5 Peserta Family Development Session... ..	66
2.2.4.6 Alat Bantu Ajar Family Development Session... ..	67
2.2.4.7 Pelaporan Pelaksanaan Family Development Session.	67
2.3 Kerangka Berpikir	69
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	70
3.2 Desain Penelitian.....	71
3.3 Fokus Penelitian	72
3.4 Data dan Sumber Data Penelitian	73
3.5 Teknik Pengumpulan Data	78
3.6 Teknik Keabsahan Data.....	80
3.7 Teknik Analisis Data.....	82
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Desa Jagalempeni.....	86
4.1.1 Kondisi Geografis Desa Jagalempeni.....	86

4.1.2	Kondisi Demografis Desa Jagalempeni.....	89
4.1.3	Sarana dan Prasarana Desa Jagalempeni.....	93
4.2	Strategi Family Development Session dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Jagalempeni.....	102
4.2.1	Hasil Penelitian.....	102
4.2.2	Pembahasan	121
4.2.3	Hasil Kuestioner Strategi Family Developmet Session dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	136
4.3	Keberhasilan Family Development Session dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Jagalempeni	139
4.3.1	Hasil Penelitian	141
4.3.1.1	Modul Pengasuhan dan Pendidikan Anak	141
4.3.1.2	Modul Kesehatan dan Gzi	145
4.3.1.3	Modul Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha	147
4.3.2	Pembahasan.....	150
4.3.3	Hasil Kuestioner Keberhasilan Family Development Session dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Jagalempeni	156
4.4	Kendala yang dihadapi Family Development Session n dalam Pemberdayaan Masyarakat	164
4.4.1	Hasil Penelitian.....	164
4.4.2	Pembahasan.....	171
4.5	Solusi atas kendala yang dihadapi Family Development Session n dalam Pemberdayaan Masyarakat	173
4.5.1	Hasil Penelitian.....	173
4.5.2	Pembahasan.....	177
BAB V	PENUTUP	
5.1	Simpulan	179
5.2	Saran	181
	DAFTAR PUSTAKA	183
	LAMPIRAN	192

DAFTAR SINGKATAN

		Penggunaan pertama kali pada halaman
CCT	<i>Conditional Cash Transfers</i>	3
FDS	<i>Family Development Session</i>	6
P2K2	Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga	6
PKH	Program Keluarga Harapan	3
PPA	Pengasuhan dan Pendidikan Anak	56
PKPU	Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha	61
KG	Kesehatan dan Gizi	59
MPA	<i>Methodology For Participatory Assessment</i>	105
KPM	Keluarga Penerima Manfaat	3
Kesos	Kesejahteraan Sosial	63
PPKH	Pelaksana PKH	11

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Peserta PKH Kabupaten Brebes Tahun 2019.....	5
Tabel 2.1	Pelaporan FDS.....	68
Tabel 3.1	Penentuan Informan Penelitian.....	76
Tabel 4.1	Penggunaan Lahan Desa Jagalempeni	88
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	89
Tabel 4.3	Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	90
Tabel 4.4	Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	92
Tabel 4.5	Keadaan Penduduk Dalam Pemanfaatan Lahan.....	93
Tabel 4.6	Sarana Pendidikan Desa Jagalempeni.....	94
Tabel 4.7	Sarana Kesehatan Desa Jagalempeni.....	95
Tabel 4.8	Sarana Peribadatan Desa Jagalempeni.....	96
Tabel 4.9	Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi Desa Jagalempeni.....	98
Tabel 4.10	Sarana dan Prasarana Ekonomi Desa Jagalempeni.....	100
Tabel 4.11	Form Hasil MPA.....	131
Tabel 4.12	Hasil Kuestioner Strategi FDS.....	137
Tabel 4.13	Hasil Kuestioner Keberhasilan FDS.....	157

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3	Kerangka Berpikir	69
Gambar 3.1	Analisis Data Kualitatif Menurut Miles Huberman.....	85
Gambar 4.1	Balai Desa Jagalempeni.....	87
Gambar 4.2	SDN 04 Jagalempeni.....	95
Gambar 4.3	Puskemas Desa Jagalempeni.....	96
Gambar 4.4	Masjid Jami' At-Taqwa Desa Jagalempeni.....	97
Gambar 4.5	Sarana Transportasi Desa Jagalempeni.....	99
Gambar 4.6	Lapak Bawang Desa Jagalempeni.....	101
Gambar 4.7	Kegiatan Modul PKPU Desa Jagalempeni bersama Ibu Nurul Khotimah.....	106
Gambar 4.8	Kegiatan MPA (<i>Methodologi For Participation Asessment</i>).....	107
Gambar 4.9	Kegiatan FDS KG Desa bersama Bidan Patmawati.	112
Gambar 4.10	Penggunaan Kartu Pasar.....	114
Gambar 4.11	Modul FDS.....	117
Gambar 4.12	Toolkit FDS.....	117
Gambar 4.13	Absensi anggota FDS	119
Gambar 4.14	Rencana Kegiatan FDS	120
Gambar 4.15	Verifikasi Fasilitas Pendidikan bersama Ibu Siti Sudiarti.....	133
Gambar 4.16	Post Kesehatan Desa (PKD) Bersama Bidan Patmawati.....	134
Gambar 4.17	Kartu Posyandu.....	135
Gambar 4.18	Warung Bersama KPM Desa Jagalempeni.....	135
Gambar 4.19	Kegiatan FDS Modul PPA bersama Bapak Sutrisno..	145

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Transkrip Wawancara.....	193
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian.....	215
Lampiran 3	Surat Kesediaan dari Pendamping Sosial....	216
Lampiran 4	Surat Kesediaan Dari PPKH Kabupaten.....	217
Lampiran 5	Surat Kesediaan Desa.....	218
Lampiran 6	Surat Kesediaan Bidan.....	219
Lampiran 7	Dokumentasi.....	220

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan sosial yang menjadi kajian dan tak pernah selesai (Permana & Sasmito, 2018) kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta jumlah masyarakat yang berada pada garis kemiskinan merupakan dua masalah besar yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut menjadi masalah global, ada yang memahaminya secara komparatif dan subjektif adapula yang melihatnya dari segi moral dan evaluatif (Nurhayat, 2016). Menurut (Cahyono & Iryani, 2018) kemiskinan merupakan kondisi yang terjadi ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun akses pendidikan dan kesehatan (Beni & Manggu, 2018).

Badan Pusat Statistik (BPS, 2019) mendefinisikan kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan itu sendiri menurut (Teguh, 2004) ditandai oleh kondisi masyarakat yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi,

peluang atau kesempatan berusaha, pendidikan, serta fasilitas hidup lainnya sehingga dalam setiap aktivitas maupun usaha menjadi sangat terbatas. Kemiskinan dapat menyebabkan efek yang cenderung menyebar (*multiplier effects*) bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Kebutuhan dasar masyarakat tidak mampu untuk dipenuhi sehingga keanekaragaman persoalan kemiskinan memerlukan upaya penyelesaian yang lengkap dan menyeluruh mencakup berbagai macam aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dan terorganisir secara baik (Permana & Sasmito, 2018).

Kemiskinan yang perlu diselesaikan paling utama adalah kemiskinan dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan tingkat pengangguran karena bidang-bidang tersebut merupakan pilar penting dalam pengentasan kemiskinan suatu negara (Lenggogeni & Iyan, 2012). Permasalahan di bidang pendidikan menjadi suatu pokok yang harus diselesaikan karena pendidikan merupakan tujuan utama dari pemerataan kesempatan dan sebagai upaya mengurangi kesenjangan sosial yang selalu terjadi dalam masyarakat. Pendidikan dapat diartikan secara luas, dan merupakan suatu proses pembelajaran yang dapat dilakukan di mana saja (Yusuf, 2014). Salah satu upaya yang dianggap cocok dalam pengentasan kemiskinan yaitu melalui pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan yang jelas dan harus tercapai, oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan memerlukan landasan dengan strategi kerja tertentu untuk meraih keberhasilannya agar tercapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengertian sehari-hari strategi, Strategi diartikan sebagai suatu tindakan atau

langkah-langkah tertentu yang dilakukan agar tercapai tujuan Dalam penanganan kemiskinan, strategi yang digunakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat (miskin) termasuk masyarakat lemah tidak berdaya untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metode, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat (World Bank dalam Mardikanto & Soebiato, 2015:28). Pemerintah berharap dengan adanya pemberdayaan ini, masyarakat bisa segera berdaya agar lepas dari kemiskinan yang selama ini menjadi permasalahan (Permana & Sasmito, 2018).

Strategi merupakan suatu proses sekaligus produk penting yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memenangkan persaingan demi tercapainya tujuan. Strategi pemberdayaan masyarakat mempunyai tiga arah seperti pemihakan dan pemberdayaan masyarakat, Pemantapan otonomi daerah dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat, Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk di dalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

Pemerintah sendiri telah konsisten menyelenggarakan berbagai macam program pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat. Salah satunya

dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Menurut (Permana & Sasmito, 2018) untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, Pemerintah sekarang ini menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007, PKH merupakan program perlindungan sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) atau program bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan di Jawa Tengah. Dengan pelaksanaannya terdapat di dua Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu : Kabupaten Brebes yang mempunyai luas wilayah sebesar 1.902,37 km² dengan kepadatan penduduk sebanyak 1.066 jiwa/km² merupakan terluas kedua setelah Kabupaten Cilacap dengan luas 2.142,59 km². Pertambahan penduduk yang cepat menyebabkan tingkat kepadatan penduduk menjadi tinggi.

Kabupaten Brebes merupakan salah satu Kabupaten pertama yang mendapat PKH pada tahun 2011 dan masih berlangsung sampai sekarang. Kabupaten Brebes terdiri dari 17 Kecamatan, dari 17 kecamatan yang ada, sebanyak lima kecamatan dihuni oleh penduduk yang memiliki tingkat kehidupan dengan kondisi memprihatinkan, masing-masing terdapat di Kecamatan Brebes, Wanasari, Bulakamba, Tanjung, dan Kecamatan Losari (Tobirin, 2010).

Penerima manfaat PKH di Kabupaten Brebes sendiri paling banyak kedua yaitu Kecamatan Wanasari, Berikut tabel jumlah Penerima manfaat PKH 2019.

Tabel 1.1 Jumlah Peserta PKH di Kabupaten Brebes Tahun 2019

No	Kecamatan	Peserta PKH
1.	Banjarharjo	7707
2.	Bantarkawung	8476
3.	Brebes	7336
4.	Bulakamba	12991
5.	Bumiayu	5606
6.	Jatibarang	3940
7.	Kersana	3442
8.	Ketanggungan	10622
9.	Larangan	9471
10.	Losari	10000
11.	Paguyangan	8131
12.	Salem	4555
13.	Sirampog	4855
14.	Songgom	4242
15.	Tanjung	8031
16.	Tonjong	5684
17.	Wanasari	11119
Total Peserta		126478

Sumber: PPKH Kab.Brebes, 2019

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerima manfaat PKH sebanyak 126.478 peserta yang tersebar di seluruh Kecamatan yang berada di Kabupaten Brebes, sedangkan jumlah peserta PKH terbanyak kedua terdapat di Kecamatan Wanasari dengan jumlah 11119 peserta setelah Kecamatan Bulakamba. Kecamatan Wanasari terdapat 20 desa dari total penerima manfaat PKH yang tersebar di Kecamatan Wanasari. Jumlah PKH di Desa Jagalempeni terdapat 1059 peserta. Berdasarkan informasi dari pemerintah daerah desa Jagalempeni terdapat 1.306 penduduk laki-laki dan 1.329 penduduk perempuan yang tidak/belum sekolah, 2.863 laki-laki dan 2849 penduduk perempuan tamatan SD, 1.265 penduduk laki-laki dan 1.146 penduduk perempuan tamatan SMP, 675 laki-laki dan sejumlah 409 perempuan tamatan SMA, 32 laki-laki dan 21

penduduk perempuan tamatan Diploma I/II, 27 laki-laki dan 33 penduduk perempuan tamatan Akademi/ Diploma III/ S.Muda, Diploma IV/Strata I hanya 1 laki-laki, 5 penduduk perempuan lulusan Strata II dan strata III hanya terdapat 3 orang perempuan. Sebanyak 699 laki-laki dan 1.539 perempuan berprofesi sebagai petani/ pekebun, 21 laki-laki dan 25 perempuan sebagai pedagang, 146 laki-laki dan 113 perempuan sebagai buruh tani, 36 laki-laki dan 87 perempuan sebagai karyawan swasta, 6 laki-laki dan 10 perempuan sebagai buruh harian lepas, dan sebanyak 2.729 belum/ tidak bekerja. (Monografi Desa Jagalempeni, 2019)

Desa Jagalempeni dikategorikan jauh dari kata sejahtera, rendahnya tingkat pendidikan dan lemahnya sumberdaya menyebabkan mereka sulit untuk menopang kebutuhan sehari-hari. Desa Jagalempeni juga termasuk dalam desa intervensi yang mana masalah kesehatan seperti gizi buruk yang dapat menyebabkan anak-anak mengalami *stunting*, dampak gizi buruk pada anak juga salah satu penyebab anak-anak putus sekolah di desa Jagalempeni. Selain itu minat belajar KPM juga sangat rendah, masih banyak dari masyarakat penerima PKH tidak mau dan jarang hadir saat pelaksanaan kegiatan FDS dengan alasan sibuk bekerja di sawah. Melihat kondisi tersebut dan di dukung dengan adanya PKH di Desa Jagalempeni yang di perkuat dengan kegiatan pendampingan. Dimana peran Pendamping sosial disini yaitu sumber daya manusia yang direkrut dan di pekerjakan sesuai dengan perjanjian dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat kecamatan. Keberhasilan PKH dipengaruhi oleh pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin dan peran Pendamping.(Rahmawati & Kisworo, 2017)PKH dalam hal ini mempunyai

kegiatan pemberdayaan yang sering di sebut dengan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau terkenal dengan istilah *Family Development Session* (FDS).

Family Development Session merupakan proses pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan keterampilan hidup masyarakat miskin dengan fokus utama di bidang ekonomi, pendidikan anak, kesehatan, dan perlindungan anak yang masing-masing materi terangkum dalam sebuah modul dengan berbagai sesi yang berurutan. Dalam kegiatan FDS ini adanya suatu proses kegiatan pembelajaran pendidikan terhadap perkembangan potensi peserta FDS untuk memenuhi kelangsungan hidupnya secara pribadi dan masyarakat luas. (Kurnia & Budiartati, 2017). Pendamping PKH dalam melaksanakan FDS kepada KPM di wilayah dampungannya tidak sekedar sebagai petugas verifikasi komitmen, akan tetapi sekaligus berperan sebagai fasilitator atau tutor dimana antara peserta FDS yang dianggap sebagai warga belajar dan pendamping sosial sebagai tutor disini tidak saling menggurui dan tidak membedakan antara peserta FDS yang satu dengan peserta lainnya agar masing –masing peserta FDS dapat memperoleh hasil belajarnya dengan maksimal (Senjawati & Fakhrudin, 2017). Fasilitasi yang dilakukan pendamping yaitu memberikan materi FDS yang sudah dirangkum dalam suatu modul.

Pelaksanaan pemberdayaan kegiatan FDS dalam hal ini merupakan *pilot project* PKH yang mana keberhasilan pendamping tidak diukur dari banyaknya pelajaran atau modul yang disampaikan, tetapi seberapa jauh terjadi proses belajar bersama yang dialogis yang mampu menumbuhkan kesadaran (sikap)

KPM, pengetahuan, dan keterampilan “baru” yang mampu merubah kelompok dampungannya ke arah kegiatan dan kehidupan yang lebih mensejahterahkan KPM dampungannya masing-masing (Mardikanto & Soebiato, 2015:68-69).

Proses belajar dalam pemberdayaan bukanlah proses “menggurui”, melainkan menumbuhkan semangat belajar bersama yang mandiri dan partisipatif (Mead dalam Mardikanto & Soebiato, 2015:68). Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilihat dari seberapa jauh terjadi dialog, diskusi dan pertukaran pengalaman (*sharing*) yang terjadi antara fasilitator dan KPM, dimana fasilitator tidak harus lebih pintar akan tetapi bisa berasal dari kalangan biasa yang mempunyai pengalaman yang bisa dibagikan. Pemberdayaan selalu mengacu pada kebutuhan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi dan sumberdaya masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang diberdayakan.

Pelaksanaan FDS kepada KPM ini haruslah menggunakan pendekatan andragogi, dimana pendekatan pembelajaran menggunakan prinsip orang dewasa, konsep pembelajaran andragogi yaitu pemberian pengalaman kepada KPM untuk mengembangkan pengetahuan, *skill* dan sikap sesuai dengan tujuan adanya kegiatan FDS. Pendekatan andragogi juga tidak hanya untuk diketahui saja akan tetapi di aplikasikan dalam setiap tahapan belajar agar pembelajaran berlangsung efektif dan efisien. Untuk itu, jumlah peserta pada setiap kelas tidak lebih dari 30 orang. Pendidikan dan pelatihannya dapat dilaksanakan di mana saja dengan suasana informal, tempat sederhana, murah dan menyenangkan (Basleman & Mappa, 2011).

Latar belakang pendidikan pendamping yang berbeda-beda mempengaruhi model pembelajaran dan gaya penyampaiannya pula. Berdasarkan hasil observasi, tidak semua pendamping menerapkan konsep pembelajaran orang dewasa atau yang sering disebut dengan istilah andragogi. Masih banyak pendamping yang melaksanakan FDS hanya untuk menggugurkan kewajiban tanpa memperhatikan KPM nya, sehingga pada saat FDS, peserta atau KPM hanya duduk pasif tanpa memperhatikan diskusi pada saat kegiatan FDS, dan jumlah yang terlalu banyak sekitar 40-55 peserta sehingga tujuan kegiatan FDS untuk mewujudkan cita-cita kegiatan FDS dalam merubah pola pikir, kemandirian KPM, akan sangat lama tercapainya jika hal tersebut didiamkan.

Di sisi lain, pendamping masih menghadapi berbagai permasalahan ketika melaksanakan kegiatan FDS. Permasalahan tersebut terkait dengan beban jumlah KPM yang berkisar antara 350-400 KPM / pendamping, kegiatan pemutakhiran data KPM meliputi verifikasi pendidikan dan kesehatan, belum mendapatkan diklat FDS, dan ditambah dengan kegiatan komplementaritas yang menghambat kegiatan FDS yaitu pendamping melakukan pencairan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) peserta PKH. Permasalahan tersebut memerlukan solusi agar pendamping dapat melaksanakan FDS dengan maksimal.

Program kesejahteraan sosial dilaksanakan dalam usaha untuk membantu mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial yang dihadapi oleh masyarakat yang kurang beruntung. Karakteristik umum KPM adalah mereka yang mengalami keterbatasan secara sosial, ekonomi, intelektual dan emosional. Perbedaan persepsi pada KPM tersebut menyebabkan mereka kesulitan untuk memahami

dengan baik maksud dan tujuan program kesejahteraan sosial. Sehubungan dengan itu, maka diperlukan pendampingan sosial pada program-program kesejahteraan sosial (Ningrum, 2017).

Pendamping sosial pada program penanganan kemiskinan dan kelompok rentan memiliki peranan penting yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas KPM, sehingga mereka berdaya untuk mengatasi masalahnya sendiri, dan melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka (Susantyo, 2018). Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, PKH belum seutuhnya melakukan intervensi yang komprehensif pada aspek makanan dan non makanan yang dijadikan tolak ukur kemiskinan itu. Intervensi yang dilakukan PKH terbatas pada aspek non makanan (pendidikan dan kesehatan). Masih ada aspek kemiskinan non makanan yang belum diintervensi seperti perumahan dan sandang. Sementara komponen kemiskinan makanan tidak diintervensi secara eksplisit oleh PKH. Harus diakui, saat ini memang sudah banyak penerima manfaat PKH yang memperoleh bantuan makanan dan non makanan sekaligus seperti halnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan lain-lain yang merupakan bagian dari sinergitas dan komplementaris program yang pengendaliannya berada di luar PKH (Susantyo & Nainggolan, 2018).

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang bertema **“Strategi *Family Development Session* (FDS) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes”**. Karena penelitian ini baru pertamakali

dilaksanakan di Desa Jagalempeni yang merupakan desa intervensi dan diharapkan mampu untuk membawa perubahan dalam mengurangi jumlah KPM PKH agar mandiri dan dengan penuh kesadarannya untuk graduasi mandiri dari kepesertaan PKH.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan masih menjadi prioritas utama di Jawa Tengah Khususnya di Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2. Program Keluarga Harapan merupakan upaya dalam penanggulangan kemiskinan akan tetapi pelaksanaan PKH masih belum maksimal, dengan melihat jumlah KPM terbanyak di Kecamatan Wanasari tepatnya Desa Jagalempeni.
3. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan menyebabkan masyarakat Jagalempeni termasuk dalam desa intervensi.
4. *Family Development Session* sebagai *pilot project* PKH namun belum ada monitoring yang serius dari pihak Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) Kabupaten Brebes

1.3 Cakupan Masalah

Cakupan masalah dalam penelitian ini adalah mencakup mengenai strategi proses pelaksanaan *Family Development Session* (FDS) yang merupakan bagian dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pemberdayaan masyarakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari

Kabupaten Brebes meliputi strategi pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui FDS, kendala serta solusi agar sesuai dengan tujuannya yaitu merubah pola pikir masyarakat agar sadar akan pentingnya pendidikan, kesehatan, ekonomi serta memanfaatkan layanan kesejahteraan sosial dalam jangka pendek mengurangi beban peserta PKH dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

1.4 Rumusan Masalah

Akar masalah yang akan diteliti adalah menyangkut proses pemberdayaan keluarga penerima manfaat melalui kegiatan FDS. Pemberdayaan yang dijalankan sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan di Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan di atas, rumusan masalah peneliti ini sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemberdayaan keluarga penerima manfaat melalui FDS yang dilaksanakan oleh pendamping sosial di Desa Jagalempeni?
2. Bagaimana hasil capaian pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan FDS di Desa Jagalempeni?
3. Kendala yang dihadapi atas pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh pendamping?
4. Solusi atas kendala yang dihadapi dalam kegiatan FDS yang dilakukan pendamping sosial Desa Jagalempeni?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan, menganalisis dan memberikan makna terhadap:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemberdayaan keluarga penerima manfaat melalui FDS yang dilaksanakan oleh pendamping sosial di Desa Jagalempeni
2. Mendeskripsikan dan menganalisis hasil capaian pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan FDS di Desa Jagalempeni
3. Mendeskripsikan dan menganalisis Kendala yang dihadapi atas pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh pendamping
4. Mendeskripsikan dan menganalisis Solusi atas kendala yang dihadapi dalam kegiatan FDS yang dilakukan pendamping sosial Desa Jagalempeni

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik akademis maupun praktis, seperti uraian berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini akan menghasilkan tesis mengenai strategi pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat dijadikan rekomendasi yang positif bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang

berhubungan dengan kajian mengenai *family development session* dan strategi pemberdayaan masyarakat.

2. Memberikan gambaran yang konkret kepada pimpinan dan pengurus Program Keluarga Harapan pelaksanaan kegiatan FDS di Desa Jagalempeni.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Organisasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi bagi suatu organisasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang pemberdayaan masyarakat.

2. Bagi Pengelola Program

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa kajian konseptual tentang pemberdayaan masyarakat agar lebih memberikan sumbangsih baru dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Brebes.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai manfaat pembelajaran andragogi yang diterapkan pada saat pelaksanaan FDS di lapangan.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS DAN KERANGKA
BERPIKIR

2.1 Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencari dasar pijakan untuk membangun landasan teori yang dilakukan dengan salah satu cara diantaranya melalui *review* dengan penelitian sebelumnya (Sukardi, 2010). Pada penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat Program Keluarga Harapan melalui kegiatan *Family Development Session* di desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari merujuk pada pendekatan pembelajaran orang dewasa. Berikut *review* penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

Penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2016) dalam “Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan Studi Pada Kegiatan *Family Development Session* di Desa Manduro Manunggalgajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto” mengatakan bahwa pemberdayaan merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pemberdayaan yang dimaksudkan dengan melalui beberapa tahapan yaitu tahap penyadaran dan pembentukan perilaku, tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan melalui kegiatan FDS di Desa Maduro Manunggalgajah sudah baik, hanya kurang optimal. Kesamaannya dengan yang dikaji peneliti saat ini

adalah sama-sama mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat melalui FDS, namun perbedaannya yaitu penelitian sekarang akan membahas strategi pemberdayaan masyarakat dan lokasi yang berbeda.

Kesamaan penelitian mengenai FDS yang dilakukan (Mughofar, dkk 2018) dengan judul “Tindak Tutur Direktif Dalam *Family Development Session* (FDS)” melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui jenis tindak tutur direktif dalam proses *Family Development Session* (FDS) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Boyolali. Melalui pendekatan sosiopragmatik dalam menjawab permasalahan dan menginterpretasikan maksud percakapan yang dilakukan oleh pendamping sosial dan keluarga penerima manfaat PKH dengan mempertimbangkan konteks situasi tutur. Penelitian ini menghasilkan bahwa adanya contoh tindak tutur direktif dalam pelaksanaan FDS tersebut berupa permintaan, perintah dan saran. Pada tahun 2019 ini penelitian (Mughofar, dkk 2019) yang berjudul “*The Portrait of Directive Speech Act in Family Development Session*” termuat dalam *American Journal of Humanities and Social Sciences Research* (AJHSSR). Persamaanya dengan penelitian yang sedang dikaji saat ini adalah sama-sama mengkaji tentang FDS, Perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada upaya FDS dalam pemberdayaan masyarakat bukan pada tindak tutur direktif kegiatan FDS.

Penelitian (Ekatiningsih, 2016) yang berjudul “Pelaksanaan Program Pendidikan Dan Pelatihan *Family Development Session* Bagi Pendamping Program Keluarga Harapan Di Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta” dengan menggunakan pendekatan

deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelatihan FDS melalui tahapan perencanaan diklat FDS PKH yang meliputi analisis kebutuhan diklat baik dari perencanaan kurikulum, modul pembelajaran, dan metode pembelajaran yang disusun oleh Pusdiklat Kesejahteraan Sosial dan BBPPKS Yogyakarta adalah sebagai penyelenggara diklat. Tahapan pelaksanaan diklat meliputi registrasi peserta, pengarahan teknis dari panitia, pra test, dan evaluasi penyelenggaraan. Tahap proses evaluasi diklat terdiri dari dua dampak diklat dan faktor pendukung yaitu sarana dan prasarana diklat lengkap, media cukup baik dan faktor penghambat yaitu pendistribusian media pembelajaran kurang lancar, dan kurang disiplinnya peserta. Persamaan dalam penelitian sekarang yaitu sama sama membahas tentang FDS dan yang menjadi pembedanya yaitu penelitian sekarang fokus pada KPM PKH setelah pendamping melaksanakan FDS di wilayah dampungannya.

Pelaksanaan FDS yang sudah diterapkan oleh program pengentasan kemiskinan di Filipina yang sering disebut dengan 4Ps, dalam penelitiannya oleh (Frivaldo, 2012) yang berjudul "*The Pantawid Familyang Pilipino Program (4Ps): Improving Human Capital And Breaking Intergeneration Cycle Of Poverty In The Phillippines*". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengevaluasi dampak pada sesi pengembangan keluarga (FDS) sebagai syarat dari program 4Ps tentang peningkatan SDM penerima program 4Ps dan terobosan dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi di kota tertentu di provinsi Quezon. Pengevaluasian FDS juga dilakukan pada program 4Ps seperti yang dilansir dalam penelitian (Pambid, 2017) yang berjudul "*Level of Application of Family Development*

Session to Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) Beneficiaries”, syarat dalam menerima bantuan 4Ps adalah dengan menghadiri pelaksanaan FDS. Penelitian ini mengkhususkan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan FDS kepada penerima program pada sesi yang berkaitan dengan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan 60 responden dari Bayambang, Pengasinan. Adapaun penerima 4Ps ini ditanya tentang profil dari keluarga, tipe dan jumlah anak serta pertanyaan terkait penerapan kesehatan yang berhubungan dengan masalah penyakit pada anak-anak, termasuk pengelolaan sampah pada rumah penerima program 4Ps. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pencegahan penyakit pada anak, kebersihan lingkungan selalu diterapkan pada keluarga penerima program 4P’s. Semua praktek kegiatan seputar kesehatan yang dijelaskan pada pelaksanaan FDS diterapkan oleh penerima dan kegiatan tersebut dibidang efektif. Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu sama sama membahas hasil dari kegiatan FDS akan tetapi penelitian sekarang yaitu membahas juga kendala dan menganalisis solusi yang ditawarkan ketika menghadapi kendala yang dihadapi pada pelaksanaan FDS.

Jurnal yang ditulis (Murib & Parojow, 2018) dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Ranotana Weru”, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerima PKH tidak tepat sasaran dari tujuan utama PKH karena masyarakat setempat menggunakan bantuan PKH untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dibandingkan pendidikan dan kesehatan. Sejalan dengan penelitian

(Raharjo, Suminar,dkk 2016) yang berjudul “Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pendidikan Non Formal Di Jawa Tengah”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, melalui metode pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dengan hasil bahwa program PAUD, keaksaraan, kesetaraan, kursus, pelatihan, KBU, magang yang kembangkan PKBM di Jawa Tengah merupakan program yang dikembangkan dalam menanggulangi kemiskinan. Peran PKBM yang diterapkan merupakan salah satu pusat informasi pendidikan dan pelatihan masyarakat serta membentuk kebiasaan belajar agar membentuk sikap kemandirian masyarakat. Adapun hambatan internal dari hasil penelitiannya yaitu belum terpenuhinya penyelenggaraan beasiswa *full* bagi warga belajar dan sulit mencari tutor yang diidealkan. Hambatan eksternalnya berupa minimnya akses sumber keuangan serta persaingan pemasaran produk. Dukungan internalnya berupa komitmen yang tinggi dari pengelola serta budaya kerja secara kekeluargaan. Dukungan eksternalnya berupa berbagai dukungan baik dari pihak pemerintah, swasta, berbagai mitra kerja serta media massa yang ikut dalam publikasi.

Kesamaan penelitian tersebut searah dengan (Malik & Mulyono, 2017) tentang “Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal Melalui Pemberdayaan Masyarakat”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu program pemberdayaan dalam pengembangan yang dilakukan dengan cara pelatihan pembuatan jam tangan dari kayu. Produksi dilakukan oleh warga belajar paket B dan C setelah selesai pembelajaran kejar paket.

Pembahasan mengenai “Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Melalui Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Kelun Kecamatan Kartonoarjo Kota Madiun”. (Nataya & N, 2017). Dalam penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan hasil yang menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan termasuk dalam motivasi dan kemitraan yang mendekati target yang telah ditentukan agar semuanya bisa berjalan optimal. Proses pemberdayaan menemui kendala seperti waktu pelaksanaan dan pendanaan yang meskipun tidak menghambat jalannya PKH. Persamaanya dengan penelitian yang sedang dikaji saat ini adalah sama-sama mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat PKH, namun perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada kegiatan FDS, kendala dan solusi atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan FDS.

Hal serupa terdapat dalam penelitian tentang pemberdayaan menurut (Kurniawati & Nurhalim, 2017) yang berjudul “Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Dalam Pengelolaan Limbah Plastik”. Penelitian tersebut mendeskripsikan proses pemasaran hasil dari limbah plastik yang telah diolah di kampung Margosari Kota Salatiga, yang menunjukkan hasil bahwa pemberdayaan UPPKS dalam pengelolaan limbah plastik yang didesain berdasarkan tujuan, materi, pengelolaan, keterampilan dan pemasaran. Penelitian tersebut berkategori baik dan efektif dalam pengelolaan limbah plastik. Persamaanya dengan penelitian yang sedang dikaji saat ini adalah sama-sama mengkaji tentang pemberdayaan namun perbedaannya pemberdayaan sekarang yaitu yang dilakukan PKH kepada peserta FDS.

Sejalan dengan penelitian (Mulyono, 2017) dengan tema “Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang”, merupakan penelitian dengan menggunakan *mixed method* yaitu menggabungkan antara dua pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini dimana masyarakat miskin yang menganggur adalah seorang yang tidak mempunyai penghasilan atau uang, sedang pengangguran adalah orang yang tidak bekerja atau berdiam diri di rumah. Kriteria miskin dibedakan secara fisik dan non fisik. Secara fisik terdiri dari status kepemilikan tanah, rumah, dan aset yang dimiliki, sedang non fisik terdiri dari pekerjaan, pendapatan, pengeluaran, potensi, dan pengangguran. Ada tiga formulasi strategi pemberdayaan masyarakat yaitu *pertama* apabila *supply* lebih kecil dari *demand*, strategi ini difokuskan dari pelatihan dasar sampai warga belajar mampu usaha mandiri atau bekerja, *kedua supply* sama dengan *demand*, strategi ini difokuskan pada skill kewirausahaan, dan strategi yang ketiga apabila *supply* lebih tinggi dari *demand*, strategi ini difokuskan pada fasilitasi usaha atau fasilitasi pencarian alternatif pengembangan. Model strategi pemberdayaan masyarakat adalah pendukung kinerja agen pembaru dalam melaksanakan program kegiatan pemberdayaan masyarakat. Persamaan dengan penelitian sedang dikaji saat ini adalah sama sama mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat akan tetapi penelitian ini membahas strategi.

Penelitian tentang pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Menurut (Sutarto, Mulyono, Nurhalim, & Pratiwi, 2018) yang

berjudul “Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Kecakapan Hidup Berbasis Keunggulan Lokal Desa Wisata Mandiri Wanurejo Borobudur Magelang”, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kecakapan hidup berbasis keunggulan lokal dilakukan dengan pemberian keterampilan kecakapan pemandu wisata, kecakapan seni budaya/tari, dan kecakapan busana jawa/ blangkon/ wiru jarik; dan model konseptual yang ditawarkan berorientasi pada penyempurnaan model yang telah dilakukan selama ini seperti yang telah dipaparkan di atas. Modifikasi dimulai dari identifikasi masalah dan kebutuhan pelatihan, pendampingan teknis, dan seterusnya pelibatan pelaku usaha mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kecakapan hidup dan proses pemagangan, pendampingan manajemen, pemasaran, dan penggalian bantuan kegiatan dari pemerintah.

Menurt (Muslikhah, dkk 2018) dalam penelitian yang berjudul “*The Implementation of Adult Learning Assumption Readiness Relationships in Improving the Effectiveness of Learning Process*”, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya peran seorang pendamping dalam merubah ke arah positif warga belajarnya melalui pengetahuan dan pengalaman. Peserta FDS diharapkan mampu untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya agar bisa menyampaikan informasi dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengembangan keluarga sehingga terjadi komunikasi dua arah antara fasilitator dengan warga belajar melalui proses pembelajaran dengan asumsi belajar orang dewasa. Sedangkan menurut penelitian (Kuntoro, 2006) dalam penelitiannya yang berjudul “Pendidikan Nonformal (PNF) Bagi Pengembangan Sosial”, mengatakan

bahwa pendidikan nonformal sering diimplementasikan sebagai pendidikan praktis untuk mengatasi masalah ekonomi, peserta didik untuk berorientasi pada bidang ekonomi saja sehingga menyebabkan aspek sosial dan budaya terabaikan. Seharusnya pendidikan nonformal diartikan lebih luas lagi dalam mengembangkan segala aspek sosial manusia dengan menerapkan tujuan dari pendidikan nonformal yaitu pendidikan seumur hayat di masyarakat.

Dari berbagai penelitian tersebut, pada penelitian kali ini, Peneliti akan memfokuskan permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menganalisis strategi dan proses *Family Development Session* dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Temuan penelitian yang akan dihasilkan adalah bentuk proses pemberdayaan masyarakat dari kegiatan *Family Development Session* setelah diberlakukannya kewajiban pendamping sosial dalam melaksanakan kegiatan *Family Development Session*. Penelitian ini baru pertama kali dilakukan pada desa intervensi di Kabupaten Brebes. Hal tersebut menjadi pembaharuan dalam penelitian mengenai *family development session*.

2.2 Kerangka Teoretis

2.2.1 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang relevan untuk dikaji terus menerus bukan karena masalah kemiskinan masih hadir di tengah-tengah kita, namun gejala kemiskinan semakin meningkat seiring dengan krisis multidimensional yang dihadapi oleh bangsa Indonesia (Ras, 2013). Kemiskinan merupakan kondisi ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasi

kekuatan sosial yang meliputi modal produktif (tanah, perumahan, alat produksi dan kesehatan), sumber keuangan (pekerjaan dan kredit), organisasi politik yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama (koperasi, organisasi sosial), jaringan untuk memperoleh pekerjaan, barang dan jasa, pengetahuan dan keterampilan serta informasi (Friedmann, 1979 :20). Kemiskinan tersebut yang mengakibatkan seseorang mengalami kesulitan dalam menghadapi kehidupan (Sahroni, 2011: 38). Potret kemiskinan yang terjadi sangat bertentangan antara masyarakat yang hidup dalam kemewahan dan masyarakat yang serba kekurangan, perbedaan tersebut cukup membahayakan (Syawie, 2011), karena terjadi ketimpangan sosial antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan masyarakat berpenghasilan rendah (Solikhatun, Supono, dkk 2014).

Permasalahan kemiskinan bukan hanya dari segi ekonomi saja, namun menyangkut permasalahan dari segi sosial dan psikologis. Maka akan timbul kesulitan jika kemiskinan diobjektifkan dalam bentuk angka, sama seperti penentuan garis kemiskinan yang masih diperdebatkan (suradi, 2012), karena keadaan perekonomian yang masih kontradiksi (Wahyuni & Damayanti, 2014), dimana permasalahan kemiskinan makin sulit diturunkan karena data kemiskinan juga bergerak. Ketika angka kemiskinan tidak bisa dikejar dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat, sudah pasti masyarakat tidak bisa melewati angka atau garis kemiskinan (Pudjianto & Syawie, 2015).

Indikator kemiskinan juga dapat dilihat dari berbagai pendekatan. Pendekatan pertama, kemiskinan dapat dilihat dari sedikit maupun banyaknya pengeluaran masyarakat, pendekatan kedua bersifat dari berbagai dimensi dan

pendekatan ketiga dilihat dari kesenjangan antar wilayah. Ketiga pendekatan tersebut mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam menggambarkan kemiskinan dan dipergunakan secara bersamaan dalam menangani kemiskinan (Djumiarti, 2005).

Sejalan dengan pengertian kemiskinan tersebut di atas bahwa kemiskinan merupakan persoalan dari berbagai dimensi (pendidikan, ekonomi, kebijakan, sosial budaya, dan proteksi), dalam hal ini, dimensi pendidikan yang paling utama untuk memecahkan persoalan kemiskinan (Ahmadi, 2012). Melalui pendidikan akan melahirkan manusia cerdas dan berkualitas, dari situ akan menumbuhkan berbagai aspek pendorong seperti berkembangnya ekonomi, sosial, politik dan budaya untuk kemajuan daerah (Miradj & Sumarno, 2014). Definisi kemiskinan yang dikatakan sebagai suatu masalah dari berbagai dimensi yang kompleks dan multi interpretasi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Lister, 2010), bahwa kemiskinan memang bukan hanya dari permasalahan tunggal yang berdiri diluar sejarah dan budaya. Lister yang termasuk memandang bahwa permasalahan kemiskinan sebagai konsep politik karena kondisi struktural sosial-ekonomi, relasi kekuasaan, berbagai sikap budaya dan kebijakan yang dikembangkan dalam menangani kemiskinan mencerminkan konseptualisasi yang dominan (Lister, 2010) bahwa kemiskinan merupakan *“lacking sufficient money to meet basic needs”*. Jadi, kemiskinan diartikan dari sisi kelangsungan hidup; dan lebih mengacu pada subsitem yang terkait dengan standar kapasitas fisik yang dibutuhkan dalam produksi pekerjaan.

Dari pernyataan tersebut dapat dikemukakan bahwa standar kemiskinan mengacu pada masyarakat yang tidak miskin. Dimana keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan disebut miskin (Joseph dan Sumption dalam Lister, 2010: 20-21). Terkait dengan pengertian kemiskinan menurut (Arsyad, 2016), merupakan kondisi masyarakat yang belum mampu dalam menjalani proses perubahan karena ketidakberdayaannya. Kemiskinan merupakan sebuah masalah klasik yang memiliki kompleksitas tinggi (Susantyo & Nainggolan, 2018). Kemiskinan lahir dari adanya keadaan ketidakadilan, ketergantungan dan ketimpangan dalam struktur masyarakat (Chambers, 1995). Inti dari kemiskinan terletak dari istilah “*deprivation trap*” atau perangkap kemiskinan, dimana secara rinci *deprivation trap* terdiri dari lima unsur yaitu ketidakberdayaan (*powerlessness*), kerentanan (*vulnerability*), kelemahan fisik (*physical weakness*), isolasi (*isolation*) dan kemiskinan (*poverty*).

Definisi kemiskinan selanjutnya dikemukakan oleh (Suharto, 2013:73-74) yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah sosial yang berkaitan erat dengan kebijakan sosial yang merupakan masalah yang sangat dikenal orang. Ada dua pendekatan dalam mendefinisikan kemiskinan yaitu pendekatan relatif dan absolut. (Zastrow, 2000a; Zastrow, 2000b; Suharto, 2006 b). Kemiskinan relatif mengatakan bahwa orang miskin yaitu seorang yang memperoleh pendapatannya di bawah rata-rata. Misalnya masyarakat yang berpendapatan seperlima atau sepersepuluh di bawah masyarakat lain. Jadi kemiskinan relatif disebabkan karena adanya perbedaan pendapatan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Sedangkan kemiskinan absolut mengartikan bahwa ukuran

kemiskinan didasarkan pada kemampuan daya beli masyarakat. Dimana total pendapatan per bulan dan per tahun biasanya digunakan sebagai indikator kemiskinan. Berdasarkan indikator tersebut, orang miskin diartikan sebagai orang yang tidak bisa memenuhi standar minimum kebutuhan hidupnya.

Senada dengan pengertian kemiskinan di atas, bahwa seorang dikatakan menjadi miskin karena dipengaruhi oleh faktor sosio-kultural. Merupakan faktor dari dalam diri masyarakat tersebut, baik individu, kelompok maupun komunitas. Nilai yang sudah terorganisir dengan baik, akan membentuk siklus atau lingkaran setan (*vircius sircle*) yang menghambat bagi orang miskin keluar dari kondisi yang mereka hadapi (Suradi, 2012).

Masalah kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga masalah kerentanan masyarakat untuk menjadi miskin. Masalah kemiskinan juga menyangkut tidak terpenuhinya hak dasar masyarakat miskin dalam mempertahankan kehidupan bermartabat. Pemecahan masyarakat miskin didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin termasuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak sosial, budaya, ekonomi dan politik (Muhtar & Huruswati, 2015).

Kemiskinan yang terjadi tentunya akan menghambat dalam pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Misalnya sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan dapat diartikan ketika suatu masyarakat belum bisa memenuhi kebutuhan dasar, air bersih, sumberdaya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan tindak kekerasan hal berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Definisi terkait kemiskinan merupakan kondisi dimana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hingga menyebabkan kondisi dengan serba kekurangan, baik sandang, papan dan pangan. Tidak hanya itu, untuk keperluan lainnya seperti pendidikan dan kesehatan juga ikut terabaikan (Mulyono, 2017:7). Jadi, dari definisi kemiskinan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dapat dikemukakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, untuk menanganinya perlu sinergitas dari berbagai multi dimensi agar tujuan dari setiap program pengentasan kemiskinan berjalan lebih efektif dan efisien.

2.2.1.1 Karakteristik Kemiskinan

Karakteristik kemiskinan menurut (Kartasmita, 1996:4) merupakan kemampuan masyarakat lemah dalam berusaha dan terbatasnya akses dalam kegiatan ekonomi, sehingga masyarakat semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang berpotensi tinggi. Sementara itu menurut Soemardjan (dalam Sumodiningrat, 1999: 81) mendeskripsikan cara pengukuran kemiskinan dengan standar yang berbeda-beda dengan tetap memperhatikan dua kategori kemiskinan, yaitu: *Pertama*, kemiskinan absolut yaitu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan pokoknya; *Kedua*, kemiskinan relatif yaitu kondisi berdasarkan proporsi distribusi pendapatan antar lapisan masyarakat sosial. Menurut Supriatna (1997:82) mengungkapkan lima karakteristik penduduk miskin, antara lain: (1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri, (2) Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, (3) Tingkat pendidikan rendah, (4) Banyak diantara

masyarakat tersebut tidak memiliki fasilitas, (5) Diantara mereka berusia muda dan tidak memiliki keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Menurut (Chambers, 1983:109), ada lima karakteristik kemiskinan antara lain; (1) Kemiskinan (*poverty*), merupakan faktor yang menentukan dibanding yang lainnya, karena hal ini terkait dengan kebutuhan dasar atau pokok, pendidikan dan kesehatan yang tidak terpenuhi oleh pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini yang menyebabkan kelemahan dari faktor yang lainnya. (2) Fisik yang lemah (*physical weakness*) merupakan adanya rasio ketergantungan yang tinggi antara anggota keluarga dalam mencari nafkah, karena adanya tingkat produktivitas tenaga kerja yang sangat rendah. (3) Keterasingan (*isolation*) disebabkan karena tidak berpendidikan, tempat tinggal yang jauh di luar jangkauan komunikasi sehingga mengakibatkan kemiskinan dimana pelayanan atau bantuan pemerintah sulit menjangkau mereka. (4) Kerentanan (*vulnerability*) biasanya keadaan keluarga yang tidak mempunyai cadangan baik makanan maupun uang untuk menghadapi keadaan darurat. (5) Ketidakberdayaan (*powerless*) yaitu kondisi dimana orang miskin tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi orang yang lebih kuat (*powerfull*) yang seringkali mengeksploitasi mereka.

Sejalan dengan pendapat di atas (Moeljarto,1995:98) mengungkapkan tentang *Poverty Profile* sebagai berikut: Masalah kemiskinan bukan hanya masalah *welfare* akan tetapi mengandung enam alasan antara lain: (1) Masalah kemiskinan adalah masalah kerentanan. (2) Kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja karena hubungan produksi dalam masyarakat tidak

memberi peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam produksi. (3) Masalah ketidakpercayaan, perasaan emosional dan sosial dalam menghadapi elit desa dan para birokrat, sehingga membuat masyarakat tidak berdaya. (4) Kemiskinan juga bisa berarti menghabiskan sebagian besar penghasilan untuk konsumsi pangan dalam kualitas dan kuantitas terbatas. (5) Tingginya rasio ketergantungan, karena jumlah keluarga yang besar. (6) Adanya kemiskinan yang diwariskan secara terus menerus.

Karakteristik dari kemiskinan menurut (Suharto, 2013: 77) ditandai dengan faktor eksternal yang bersifat struktural. Antara lain tingginya tingkat pengangguran, diskriminasi, diskriminasi rasial, otomatisasi dalam pekerjaan, kurangnya pelatihan dalam pekerjaan, diskriminasi seksual, pengangguran program anti kemiskinan serta inflasi. Sedangkan faktor internal yaitu ketidakstabilan fisik dan mental, ketergantungan pada alkohol, keahlian dalam pekerjaan yang sudah ketinggalan jaman, putus sekolah, serta kurang ketertarikan untuk mencari pekerjaan.

2.2.1.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Upaya untuk menanggulangi kemiskinan salah satunya dengan pendekatan pembangunan, merupakan upaya untuk memperbaiki keadaan masyarakat yang belum baik atau memperbaiki kehidupan masyarakat yang sudah baik agar menjadi lebih baik lagi (Suharto, 2013: 2-3). Korten (dalam Hikmat, 2004: 15-16) mengatakan bahwa ada tiga dasar perubahan normatif dan struktural dalam pembangunan masyarakat: (1) Memusatkan tindakan dan pemikiran tentang

kebijakan pemerintah pada keadaan yang mendukung usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri, mendorong dan mendukung usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sendiri dan memecahkan masalahnya sendiri baik di tingkat individu, keluarga dan komunitas. (2) Mengembangkan struktur dan proses organisasi yang berfungsi menurut kaidah sistem organisasi. (3) Mengembangkan sistem konsumsi-produksi yang diorganisir secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah pengendalian dan kepemilikan lokal.

Sejalan dengan hal tersebut, Sumodiningrat (dalam Mardikanto & Soebiato, 2015:29-30), menyatakan bahwa hakikat pemberdayaan berpusat kepada masyarakat, dengan kata lain manusia dan kemanusiaan sebagai tolak ukur normatif, struktural, dan substansial. Secara tersirat pemberdayaan memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Berkenaan dengan strategi pemberdayaan, Mark G.Hanna dan Buddy Robinson (dalam Hikmat, 2004: 19) mengemukakan ada tiga strategi utama pemberdayaan dalam praktek perubahan sosial yaitu tradisional, *direct action* (aksi langsung), dan transformasi. (1) *Strategi tradisional*, menyarankan agar memilih kepentingan terbaik dalam berbagai keadaan, (2) *Strategi direct-action*, didominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi, (3) *Strategi transformatif*, menunjukkan adanya pendidikan dalam jangka panjang dibutuhkan pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

Dengan demikian menurut (Hikmat, 2004:80) proses pembangunan masyarakat hendaknya diasumsikan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: (1)

Arah pertumbuhan masyarakat selalu bertumpu dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat dalam struktur sosial. (2) Terjadinya berbagai kondisi ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini menjadikan sebagai titik tolak bagi program pembangunan masyarakat. (3) Ketidakpuasan yang dirasakan dan dialami oleh warga masyarakat disalurkan melalui perencanaan dan tindakan masalah bersama. (4) Pelaksanaan program pembangunan masyarakat mengikutsertakan pemimpin-pemimpin yang diidentifikasi dan diterima oleh berbagai kelompok sosial dalam masyarakat. (5) Organisasi pelaksana program pembangunan masyarakat harus mengembangkan jalur komunikasi yang efektif-efisien dalam berbagai kelompok sosial dalam masyarakat, serta memperkuat kelompok untuk saling kerjasama melaksanakan prosedur kerja yang luwes-fleksibel, tanpa merusak pola pengambilan keputusan (*decision making*) secara teratur. (6) Penentuan program pembangunan masyarakat harus bertumpu pada keputusan bersama warga masyarakat secara penuh dalam proses perencanaan pembangunan.

Pembangunan masyarakat dirasa sangat penting, (Hikmat, 2004:81) mengemukakan pertimbangannya sebagai berikut:

- 1) Masyarakat yang sehat merupakan produk dari masyarakat yang aktif.
- 2) Proses perencanaan yang diinginkan masyarakat lebih baik dibandingkan dengan perencanaan yang berasal dari penguasa.
- 3) Proses partisipasi dalam pembangunan masyarakat merupakan pencegahan berbagai sikap masa bodoh dari individu dalam masyarakat.

- 4) Proses pemberdayaan yang kuat dalam upaya kemasyarakatan merupakan dasar kekuatan bagi masyarakat.

Sehubungan dengan peran pemerintah dalam setiap program pembangunan yang bersentuhan dengan kepentingan publik itu, (Sumodiningrat, 1999:202) menegaskan bahwa: Program pemberdayaan masyarakat dirancang oleh pemerintah untuk memecahkan tiga masalah utama pembangunan yakni pengangguran, ketimpangan, dan pengentasan kemiskinan. Strategi penanggulangan kemiskinan dijalankan dengan mempertimbangkan prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu: perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial, peningkatan aspek pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan pembangunan inklusif (Suyanto & Mujiyadi, 2015).

2.2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang keduanya merupakan “saudara kembar” dari usaha dalam menangani masalah tersebut. Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat (Mas’oed, 1990). Keberdayaan masyarakat oleh Sumodiningrat (1997) diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Karena itu, pemberdayaan dapat disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses

terhadap sumberdaya dengan perolehan dan akses terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah (Pranarka, 1996).

Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin, marjinal, terpinggirkan) untuk mengungkapkan pendapat atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, berorganisasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara bertanggung-gugat (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya.

Menurut (Mardikanto & Soebiato, 2015:28) pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik antara lain dalam arti:

- 1) Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan.
- 2) Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan).
- 3) Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan.
- 4) Terjamin keamanan.
- 5) Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan khawatir.

Sedangkan Menurut (Payne, 1997:266) mengemukakan bahwa pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya ditujukan guna: *“To help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power from the environment to clients”*. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa pemberdayaan merupakan proses membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi

efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal tersebut dilakukan melalui pendekatan kemampuan dan rasa kepercayaan diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya (Adi, 2008:78-79).

Menurut (Shardlow,1998) pemberdayaan pada intinya mengungkapkan bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas yang berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Dalam kesimpulannya Shardlow menggambarkan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah gagasan yang tidak jauh dari gagasan Biestek (1961) yang dikenal pada bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial dengan nama '*Self-Determination*'. Pada intinya prinsip ini mendorong klien untuk menentukan sendiri nasibnya dengan permasalahan yang sedang ia hadapi dengan kesadaran dan kekuasaan penuh dalam menentukan masa depannya.

Upaya yang diarahkan pada permasalahan kemiskinan yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakatlah yang perlu ditingkatkan kemampuannya untuk mengembangkan potensinya dalam upaya pemberdayaan. Pemberdayaan tidak hanya menumbuhkan nilai ekonomi akan tetapi juga menambahkan nilai sosial dan budaya (Alfitri, 2011: 22).

Senada dari definisi pemberdayaan secara konseptual, bahwa pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata '*power*' (kekuasaan). Pemberdayaan merupakan kemampuan masyarakat, khususnya masyarakat yang termasuk dalam kategori lemah atau rentan kemiskinan, sehingga masyarakat

kategori lemah memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, mempunyai kebebasan, dan menjangkau sumber produktif yang memungkinkan masyarakat rentan dapat meningkatkan pendapatannya serta memperoleh barang dan jasa yang masyarakat rentan perlukan (Suharto, 2005:58). Menurut Ife seperti dikutip (Suharto, 2005:59), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

- 1) Pilihan personal dan kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal dan pekerjaan.
- 2) Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- 3) Lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan dan kesehatan.
- 4) Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- 5) Sumber: kemampuan memobilisasi sumber formal, informal dan masyarakat.
- 6) Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.

- 7) Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Pembangunan masyarakat menurut (Soetomo,2013:34-35) mengandung empat unsur dasar yaitu: (1) pembangunan masyarakat pada dasarnya merupakan proses perubahan, (2) pembangunan masyarakat merupakan proses terciptanya hubungan yang harmonis antara kebutuhan masyarakat dengan potensi, sumberdaya dan peluang, (3) pembangunan masyarakat merupakan proses peningkatan kapasitas berkembang. (4) pembangunan masyarakat merupakan proses yang bersifat multidimensi. Dari keempat konsep dasar tersebut dapat dilihat sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait. Karena keempatnya berfungsi sebagai kerangka atau *body of knowledge* dari konsep pembangunan masyarakat yang akan dikembangkan.

Pendapat lain tentang pemberdayaan menurut Parsons (1994) dalam (Erwin, 2015) mencakup tiga dimensi: (1) sebuah proses pembangunan yang dimulai individual, berkembang menjadi sebuah perubahan sosial; (2) sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain; (3) pembebasan dari hasil gerakan sosial orang lemah yang mengakibatkan upaya kolektif dari orang lemah tersebut dalam memperoleh kekuasaan untuk mengubah struktur yang masih menekan. Menurut (Zastrow, 2004:431) menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat merupakan proses membantu baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam membantu meningkatkan baik secara pribadi interpersonal, sosial ekonomi dan politik dengan tujuan agar ada peningkatan kualitas hidup masyarakat

tersebut. Partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan merupakan salah satu kunci menuju kesejahteraan. Menurut Adi (2008) menjeaskan konsep pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu konsep dalam intervensi pengembangan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pemberdayaan dapat berpartisipasi baik secara paksaan maupun paksaan Sztompka (2011) dalam (Musthofa & Gunawijaya, 2015).

Kategori dalam pemberdayaan menurut (Adi, 2008: 211-222) dilihat dari program dan proses dari program tersebut. Pemberdayaan merupakan suatu program yang melewati proses atau tahapan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan jangka waktunya. Konsekuensi dari hal tersebut yaitu pemberdayaan akan selesai seiring dengan selesainya program tersebut. Sedangkan pemberdayaan sebagai proses kegiatan yang berkesinambungan (*on going*) sepanjang organisasi itu masih melakukan perubahan, dan tidak hanya terpaku pada satu program.

Pola pemberdayaan masyarakat (*community development*). Pemberdayaan (*empowerment*) hadir sebagai proses yang terjadi karena “*power disenfranchisement*” atau “*dispowerment*” yaitu penghilangan *power* pada sebagian masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak mempunyai akses yang memadai terhadap asset produktif yang dikuasai para pemilik “*power*”. Berdasarkan hal tersebut, pemberdayaan diartikan sebagai berikut: (a) pemberdayaan masyarakat sebaiknya dilakukan agar masyarakat mandiri bukan menjadikan masyarakat bergantung dengan program pemberian (*charity*); (b) tetapi, sesuatu yang dinikmati harus dihasilkan dari usaha masyarakat tersebut;

dan (c) memandirikan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan (Sopandi, 2010).

Pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk usaha dalam meningkatkan harkat dan martabat masyarakat lemah agar mampu melepaskan diri dari jeratan kemiskinan dan keterbelakangan yang bertujuan agar masyarakat mandiri dan berdaya (Nasmawati, 2016). Pengertian pemberdayaan tidak hanya memberikan kewenangan atau kepada kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Pada konsep pemberdayaan mengandung makna proses pendidikan dalam peningkatan kualitas individu, kelompok maupun masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing dan mandiri. Menurut Parsons (1994), pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk memberikan pengaruh kepada kehidupannya dan orang lain (Anwas, 2014:49-50).

Secara lebih rinci Slamet (2003), menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu di sini mengandung makna: berdaya, paham, memiliki kesempatan melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari dan menangkap informasi serta mampu bertindak sesuai inisiatif. Sedangkan pengertian menurut Suharto (2011) setidaknya mempunyai empat hal: kegiatan yang terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah, serta dilakukan melalui program peningkatan kapasitas. Sedangkan menurut (Gosh, 2013) menjelaskan bahwa : “ *empowerment is a planned and systematic process*

of transferring power, authority with responsibility and accountability, to the employees by the managers” Pemberdayaan adalah proses tereencana dan sistematis untuk mentransfer otoritas dan tanggungjawab kepada penerima manfaat program kemiskinan dari seorang pelaksana program. Sejalan dengan pengertian tersebut bahwa pemberdayaan itu juga dapat dilihat dari keunggulan sebuah organisasi kemiskinan Adapun keunggulan tersebut tergantung pada kemampuan, kreativitas pelaksana pemberdayaan masyarakat.(Mohan & Gomathi S, 2014)

Berdasarkan berbagai definisi mengenai pemberdayaan di atas, maka pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses untuk melepaskan diri dari jeratan kemiskinan agar menuju kesejahteraan masyarakat dimana dalam mewujudkan kesejahteraan dibutuhkan agar saling bersinergi baik dari program, sumberdaya manusia dan masyarakat itu sendiri.

2.2.2.1 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi merupakan suatu proses yang penting terkait dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Adapun pemberdayaan (Mardikanto & Soebiato, 2015:168-169) masyarakat dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Menyusun instrumen pengumpulan data. Dalam kegiatan ini informasi yang diperlukan dapat berupa hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, referensi yang ada, dari hasil temuan dari pengamatan-lapangan.

2. Membangun pemahaman, komitmen untuk mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat.
3. Mempersiapkan sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, intervensi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat.

Menurut (Suharto, 2005:67) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui lima strategi, yaitu: (1) Pemungkinan, merupakan cara memungkinkan potensi masyarakat miskin agar berkembang secara optimal. (2) Penguatan, yaitu menguatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dalam pemenuhan kebutuhannya. (3) Perlindungan, yaitu melindungi masyarakat kelompok lemah agar tidak terjadi eksploitasi dari masyarakat kelompok kuat. (4) Penyokongan, yaitu memberikan bimbingan motivasi agar masyarakat miskin mampu menjalankan peran dan tugasnya dalam kehidupannya. (5) Pemeliharaan, yaitu mempertahankan kondisi masyarakat yang kondusif agar terjadi keseimbangan

Mengacu pada Korten (1998), Sumaryadi dalam (Mardikanto & Soebiato, 2015: 169-170) mengemukakan adanya lima generasi strategi pemberdayaan, yaitu:

Pertama : generasi yang mengutamakan *relief and welfare*, yaitu strategi yang lebih mengutamakan pada kekurangan dan kebutuhan setiap individu dan masyarakat seperti : sandang, papan, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan.

Kedua : *strategy community development* atau *small scale reliant local development*, yang lebih mengutamakan pada kesehatan, penerapan teknologi

tepat-guna, dan pembangunan infrastruktur. Menurutny, strategi ini tidak mungkin dilakukan dengan pendekatan pembangunan dari atas (*top down approach*), tetapi harus dilakukan pendekatan dari bawah (*bottom-up approach*).

Ketiga : adalah generasi sustainable system development, yang lebih mengharapkan terjadinya perubahan pada tingkat regional dan nasional. Melalui strategi ini, diharapkan terjadi perubahan kebijakan yang keluar dari tingkat daerah (*local*) ke tingkat regional, nasional, dan internasional, utamanya terkait dengan dampak pembangunan yang terlalu eksploitatif dan mengabaikan pelestarian/keberlanjutan pembangunan.

Keempat : merupakan generasi untuk mengembangkan gerakan masyarakat (*people movement*), melalui pengorganisasian masyarakat, identifikasi masalah dan kebutuhan lokal, serta mobilisasi sumberdaya lokal yang ada dan dapat dimanfaatkan dalam pembangunan. Strategi ini, tidak sekedar mempengaruhi kebijakan, tetapi sekaligus juga mengharapkan terjadinya perubahan di dalam pelaksanaanya.

Kelima : generasi pemberdayaan masyarakat (*empowering people*) yang memperhatikan arti penting perkembangan, teknologi, persaingan, dan kerjasama, Generasi ini memperjuangkan ruang gerak yang lebih terbuka terhadap kemampuan dan keberanian masyarakat, dan pengakuan pemerintah terhadap inisiatif lokal.

2.2.2.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dalam pemberdayaan masyarakat yaitu untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki (Rozak, Hasan, Sugarno, et all, 2016).

Pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu untuk menjadikan individu serta masyarakat agar mampu melakukan perubahan perilaku menuju ke arah kemandirian (Anwas, 2014:55). Sejalan dengan Edi Suharto (2009:60) bahwa tujuan pemberdayaan salah satunya untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, terutama pada pihak lemah dengan ketidakberdayaannya. Pada intinya pemberdayaan bertujuan agar masyarakat mandiri dalam menjalani kehidupan dalam semua aspek.

Menurut (Mardikanto & Soebiato, 2015:111) mengatakan bahwa ketika terjadi perbaikan pendidikan, pemberdayaan diharapkan mampu menjadikan perubahan yang lebih baik. Perbaikan tidak hanya dalam lingkup materi, metode, tempat dan waktu melainkan perbaikan dalam menumbuhkan semangat belajar seumur hidup. Dalam pemberdayaan masyarakat melalui *Family Development Session* ini masyarakat diharapkan ada peningkatan kemampuan dalam menjalani

kehidupan yang lebih baik, dan mampu merubah pola pikir masyarakat tersebut tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan.

2.2.2.3 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mathews “Prinsip merupakan pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten”: Karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima dan diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dan kondisi. Menurut (Mardikanto & Soebiato, 2015:105) Prinsip dijadikan sebagai landasan pokok yang benar bagi kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun pelaksanaan pemberdayaan mempunyai prinsip:

- 1) *Mengerjakan*, artinya kegiatan pemberdayaan harus melibatkan masyarakat dalam menerapkan sesuatu. Karena melalui “mengerjakan” masyarakat akan melalui proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan dan keterampilannya) yang akan diingat dalam jangka waktu yang lebih lama.
- 2) *Akibat*, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik dan bermanfaat; karena perasaan senang atau tidak senang akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan di masa mendatang.
- 3) *Asosiasi*, artinya setiap kegiatan pemberdayaan dikaitkan dengan kegiatan lainnya sebab setiap orang cenderung mengaitkan dengan kegiatan lainnya.

2.2.2.4 Proses Pemberdayaan Masyarakat Menurut

Kegiatan pemberdayaan tidak bersifat selamanya, akan tetapi hanya sampai target masyarakat mampu meningkatkan keterampilan sehingga membuat masyarakat menjadi mandiri.(Tohani, Prasetyo, & Suharta, 2019) Untuk itu, pemberdayaan masyarakat haruslah melalui proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Sehingga untuk menjaga kemandirian tersebut dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara berkala agar tidak mengalami kemunduran lagi. Adapun tahapan yang harus dilalui dalam proses belajar menurut Sulistyani (2004:83) adalah:

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukkan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- 2) Tahap transformasi kemampuan yaitu wawasan, pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga masyarakat lemah dapat mengambil peran dalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, berupa kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kepada kemandirian.

Menurut Tim Delivery (2004) dalam (Mardikanto & Soebiato, 2015:125) Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat. Masing-masing tahap akan dibahas secara rinci, sebagai berikut:

1. Tahap Seleksi Lokasi/ Wilayah

Merupakan seleksi yang dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria dalam pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin agar tujuan pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan.

2. Tahap Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan. Sosialisasi masyarakat juga menentukan partisipasi dalam program pemberdayaan.

3. Tahap Proses Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat terlibat untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi Permasalahan dan Potensi Peluangnya

Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi dan menganalisa keadaannya, baik potensi yang dimilikinya maupun masalah

yang sedang di hadapi. Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

b. Menyusun Rencana Kegiatan Kelompok

Kegiatan dalam menyusun rencana kelompok meliputi kajian tentang prioritas dan analisa masalah, mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik, mengidentifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah, dan pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian.

c. Menerapkan Rencana Kegiatan Kelompok

Merupakan mengimplementasikan dari rencana kegiatan bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping dalam kegiatan yang kongkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk kegiatan implementasi yaitu pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain juga dilakukan perbaikan jika diperlukan.

d. Memantau Proses dan Hasil Kegiatan

Merupakan kegiatan meliputi proses penilaian, pengkajian, dan pemantauan kegiatan baik proses pelaksanaannya maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan jika diperlukan.

4. Tahap Pemandirian Masyarakat

Merupakan prinsip dari pemberdayaan masyarakat yang bertujuan agar memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya. Maka arah pemandirian masyarakat berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar menjadi mandiri.

Proses pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan faktor eksternal dan internal. Faktor internal sangat penting dalam self organizing dari masyarakat, namun faktor eksternal juga tidak kalah pentingnya. Pemberdayaan masyarakat semestinya di dampingi oleh fasilitator yang bersifat multidisiplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu faktor eksternal dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya sendiri.

2.2.2.5 Pendekatan Pemberdayaan

Axinn (1988) mengartikan “pendekatan” sebagai suatu “gaya” yang harus menentukan dan harus diikuti oleh semua pihak dalam sistem yang bersangkutan (*the style of action within a system*) Menurut (Kindervatter, 1979) pendekatan masyarakat yang digunakan dalam proses pemberdayaan yaitu: (1) *Community Organization*, merupakan ciri yang mengarah pada tujuan agar meningkatkan masyarakat sebagai upaya meningkatkan keadaan ekonomi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: (a) peserta ikut dalam kepengurusan atau

tugas kelompok, (b) peranan tutor hanya sebagai perantara, pembimbing dan fasilitator, (c) metode pemecahan masalah sebagai kemampuan dasar. (2) *Participatory Approaches*, merupakan pendekatan yang melibatkan setiap anggota kelompok pada kegiatan termasuk tokoh pemimpin, tokoh masyarakat dan pemangku setempat. (3) *Education for justice*, merupakan pendekatan yang menekankan pada partisipasi masyarakat agar berkembang, agar memiliki motivasi untuk berperan serta.

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan yang dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan. Parsons, et al., (1994) dalam (Mardikanto & Soebiato, 2015:258). menyatakan, bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif, namun tidak semua intervensi fasilitator dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun ada saat strategi ini tetap berkaitan dengan kolektivitas, artinya mengkaitkan penerima manfaat dengan sistem lain diluar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu mikro, mezzo dan makro.

a. Pendekatan Mikro

Pemberdayaan yang dilakukan terhadap penerima manfaat secara individu melalui bimbingan, konseling, stress management, dan crisis intervention. Tujuan utamanya adalah bimbingan penerima manfaat dalam menjalankan tugas kehidupannya atau yang sering disebut dengan pendekatan berbasis pada tugas(*task centered approach*)

b. Pendekatan Mezzo

Pemberdayaan yang dilakukan terhadap sekelompok penerima manfaat dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi peningkatan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap penerima manfaat agar mempunyai kemampuan untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapinya.

c. Pendekatan Makro

Merupakan strategi sistem besar (large system strategy), karena penerima manfaat diarahkan pada sistem yang luas. Pendekatan ini memandang penerima manfaat sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk memahami situasi mereka sendiri, untuk menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. Adapun landasan dari pendekatan makro yaitu:

1. Pendekatan Partisipatif yaitu menempatkan penerima manfaat sebagai titik pusat pemberdayaan ,mencakup : Pemberdayaan selalu bertujuan untuk pemecahan masalah masyarakat, bukan untuk mencapai tujuan orang luar atau penguasa. Pilihan kegiatan atau metode maupun teknik pemberdayaan, maupun teknologi yang ditawarkan berbasis pada pilhan masyarakat.Ukuran keberhasilan pemberdayaan berdasarkan kepada ukuran masyarakat sebagai penerima manfaatnya.

2. Pendekatan kesejahteraan, artinya apapun kegiatan yang dilakukan, dari manapun sumberdaya dan teknologi yang akan digunakan, dan siapapun yang dilibatkan, pemberdayaan masyarakat haruslah memberikan mutu hidup kepada penerima manfaatnya.
3. Pendekatan pembangunan berkelanjutan artinya pemberdayaan masyarakat tidak menciptakan kebergantungan tapi menyiapkan penerima manfaatnya agar mandiri.

2.2.2.6 Pemberdayaan dalam Pengentasan Kemiskinan

Strategi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui penguatan untuk memberdayakan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sangat miskin. Penuntasan kemiskinan menuju keluarga sejahtera perlu memasukan variabel non ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena perlu dilakukan secara holistik yang menyangkut aspek kehidupan dasar manusia. Orang menjadi miskin bukan karena dia tidak mempunyai modal usaha akan tetapi ia menjadi miskin karena punya penyangga ekonomi.

Penyebab kemiskinan yang sesungguhnya adalah melekat dalam individu atau sosial yang bersangkutan. Masalah kemiskinan sangat terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, sehingga mereka mampu berdaya, berdiri di atas kakinya sendiri atau memiliki daya tawar dan daya saing untuk mampu hidup mandiri. Dengan kata lain

pengentasan kemiskinan dapat diatasi melalui pendekatan pemberdayaan. Melalui kegiatan pemberdayaan individu dan masyarakat yang disadarkan akan potensi, kebutuhan, dan masalah yang ada pada diri dan lingkungannya dan mereka didorong untuk melakukan perubahan yang ada pada dirinya, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari masyarakat itu sendiri (Anwas, 2014:86)

2.2.3 Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Menurut (Ismayilova, Ssewamala, & Huseynli, 2014) mengatakan dukungan finansial kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam program pengentasan kemiskinan membantu mereka dalam pengentasan kemiskinan generasi penerusnya. Dalam mewujudkan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2011 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH di Kabupaten Brebes. PKH merupakan program perlindungan sosial yang dikenal dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT). Sebagai program bantuan bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) yang merupakan masalah terpenting sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi dan pemilihan reproduksi bagi KPM. (Mbizvo & Phillips, 2014) dan KPM mampu memanfaatkan layanan pendidikan (fasdik) yang berada di sekitar lingkungan tinggal KPM. Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan

memanfaatkan layanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Menurut Ritonga (2009) dalam (Laoh, 2016) program-program pengentasan kemiskinan sebelum Program Keluarga Harapan dinyatakan tidak signifikan hasilnya oleh berbagai pihak karena cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin dan karena kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri. Sejak tahun 2012, PKH telah menjadi program nasional. Ada dua hal yang menjadikan PKH sebagai program nasional yaitu: pertama, program PKH telah menjangkau seluruh provinsi. Kedua, pelaksanaan PKH dilakukan secara bersama-sama oleh masing-masing kementerian dan lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian dan lembaga. Kriteria Peserta PKH adalah keluarga sangat miskin yang memenuhi minimal salah satu syarat berikut:

1. Kriteria komponen kesehatan meliputi:
 - a. Ibu hamil/menyusui
 - b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan.
2. Kriteria komponen pendidikan meliputi:
 - a. Anak SD/MI atau sederajat
 - b. Anak SMP/MTs atau sederajat
 - c. Anak SMA/MA atau sederajat

- d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. Lanjut usia diutamakan mulai dari 70 (tujuh puluh tahun).
 - b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dimulai dari uji coba di 7 Provinsi pada tahun 2007. Ketujuh Provinsi tersebut antara lain Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara dan Gorontalo. Pada saat pertama kali diluncurkan di tujuh Provinsi yang telah disebutkan diatas pelaksanaan PKH didasarkan pada kondisi kemiskinan, gizi buruk, tingginya angka putus sekolah dan kesiapan dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Kementerian Sosial melakukan perluasan cakupan sasaran pengembangan pelaksanaan PKH dilakukan di tingkat kecamatan di Provinsi yang telah melaksanakan PKH. Provinsi Jawa Tengah menjadi peserta PKH tahun 2011 dengan kepesertaan awal terdiri dari 7 Kabupaten yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pemasang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen dengan tujuan untuk menguji instrumen terkait dan diperlukan dalam pelaksanaan PKH, antara lain metode penentuan sasaran, validasi data, verifikasi, persyaratan mekanisme penyaluran, pengaduan masyarakat, proses pendampingan. Pada tahun 2012, PKH telah disepakati menjadi program nasional, dikarenakan PKH telah menjangkau

seluruh Provinsi di Indonesia dan Pelaksanaan PKH dilakukan secara bersama-sama oleh masing masing Kementerian dan lembaga.

2.2.4 Family Development Session

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau yang dikenal dengan sebutan *Family Development Session* (FDS) merupakan sebuah intervensi perubahan perilaku yang terstruktur. P2K2 diberikan kepada semua KPM PKH sejak tahun pertama kepesertaan. Sebagai salah satu upaya dalam perubahan perilaku KPM, diperlukan edukasi berkelanjutan yang dapat memberikan pemahaman kepada KPM tentang pentingnya pendidikan, pengasuhan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan keluarga, perlindungan anak dan pengasuhan lanjut usia dan disabilitas.

Dengan demikian, pemenuhan kewajiban oleh KPM PKH tidak semata didorong oleh kekhawatiran akan penangguhan bantuan, namun juga karena adanya kesadaran manfaat pendidikan dan kesehatan bagi anak KPM PKH. Sejalan diadakannya FDS diatas, Menurut (Reddy, Salk, & Nathan, 2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa untuk mengurangi kemiskinan dann kelaparan, peningkatan perawatan kesehatan, peluang kerja untuk kehidupannya yang lebih baik perlu peningkatan literasi dan pendidikan.

Temuan dari Mexico menunjukkan bahwa FDS (disebut *platicas*) di *oportunidades Conditional Cash Transfer* (CCT) telah berkontribusi dalam memperbaiki *outcoume* kesehatan dengan mendorong konsumsi makanan yang lebih baik (Haddinott dan Skoufias, 2004) dan dengan meningkatkan pengetahuan dalam berbagai isu kesehatan (Duarte Gomez et al.,2004). Proses belajar dalam

FDS dilakukan dalam pertemuan bulanan yang selama ini menjadi kewajiban pendamping sosial terhadap KPM. Sebelum adanya FDS, pertemuan kelompok belum terselenggara secara optimal. Pendamping sosial masih kesulitan menentukan materi atau kegiatan apa yang dapat dilakukan dalam mengisi pertemuan bulanan. FDS dirancang untuk memudahkan pendamping sosial dalam melaksanakan pembelajaran rutin secara terstruktur setiap bulan kepada KPM PKH dengan materi dan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan modul yang dikembangkan oleh kementerian sosial dan pihak lainnya.

Kegiatan FDS di PPKH Kecamatan Wanasari, Desa Jagalempeni merupakan penyelenggaraan pendidikan non formal. Kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi KPM dalam keluarganya termasuk peningkatan kemampuan keluarga. Pelaksanaan FDS di Desa Jagalempeni menggunakan pendekatan partisipatif. Adapun pendekatan partisipatif ini meliputi tempat dan waktu diselenggarakannya FDS, materi FDS yang disesuaikan kebutuhan KPM tersebut dan pembelajaran aktif dari pendamping kepada KPM.

2.2.4.1 Modul *Family Development Session*

Adapun modul yang digunakan pendamping sosial dalam menyampaikan materi kepada KPM terdiri dari lima, dan dibagi beberapa sesi dalam tiap modulnya, yaitu:

1. Modul Pengasuhan dan Pendidikan (PPA)

Program Home Visits di Jamaica, Program ini mengajarkan ibu tentang pengasuhan anak untuk perkembangan kognitif yang lebih baik

serta berkesinambungan merubah perilaku dan tidak ada efek program yang menghilang dalam perkembangan anak. (Walker et.al 2000,2005)

a. Menjadi orang tua yang lebih baik

Pada sesi pertama, pesan utama yang ingin disampaikan dalam modul ini. Pertama, orang tua merupakan panutan bagi anak. Poin pelajaran yang ingin disampaikan adalah orang tua memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perilaku anak sehingga diperlukan pemahaman tentang perilaku mendidik serta konsekuensi dari perilaku positif dan negatif orang tua. Orang tua perlu menyadari bahwa status miskin bukan berarti tidak bisa memiliki kemampuan mengasuh anak dengan baik. Kedua, pentingnya kerjasama kedua orang tua dalam mengasuh anak. Meskipun ayah dan ibu memiliki peran yang berbeda dalam pengasuhan, namun tanggungjawab ayah dan ibu adalah sama. Peserta akan belajar berbagai macam cara untuk menjadi kompak sebagai orang tua, menghindari konflik di hadapan anak, termasuk mendiskusikan secara khusus bagaimana melibatkan ayah agar dapat membantu ibu dalam pengasuhan sehari-hari.

b. Memahami perkembangan dan perilaku anak

Sesi kedua dalam modul pengasuhan dan pendidikan anak yaitu orang tua diberikan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan perilaku baik anak dan juga pembelajaran yang tepat untuk mengurangi perilaku buruk anak. Dari kedua cara tersebut,

yaitu 1). Cara meningkatkan perilaku baik anak yaitu orang tua harus mengidentifikasi kelebihan anak, kemudian memahami kekuatan pujian, dan apresiasi atas perilaku baik anak. Misalnya memberikan hadiah sesuai dengan kemampuan orang tua ketika anak menunjukkan perilaku baik, (mendapatkan nilai baik disekolah, rajin, mau membantu).dan lain-lain. Sedangkan 2). Cara mengurangi perilaku buruk anak, orang tua harus memahami efek negatif dari menggunakan hukuman fisik. Strategi untuk mengurangi perilaku buruk pada anak dapat diganti dengan menetapkan aturan bersama anak, menjelaskan konsekuensi yang masuk akal kepada anak, memberikan waktu menenangkan diri dan mengabaikan perilaku anak yang tidak berbahaya dan ditunjukkan untuk mencari perhatian.

c. Memahami cara anak usia dini belajar

Pendamping sosial dalam hal ini sebagai fasilitator memberikan gambaran kepada KPM bahwa bermain sebagai cara anak untuk belajar dan secara khusus membahas bahwa berbagai kegiatan bermain untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak. Orang tua anak mempelajari apa itu permainan dan bagaimana bermain sesuai dengan tahapan usia anak, serta cara menggabungkan permainan kedalam kegiatan sehari-hari. Secara khusus orang tua akan belajar pentingnya kemampuan bahasa bagi anak dan berbagai jenis permainan untuk menstimulasi

perkembangan bahasa anak. Menggabungkan permainan dengan kegiatan sehari-hari misalnya saat orang tua mencuci pakaian, anak sambil bermain bola dan berhitung, bermain tebak-tebakan ketika ayah mengajak untuk menggosok gigi, dan lain-lain, karena kegiatan tersebut akan membantu proses tumbuh kembang anak terutama kemampuan berbahasa anak. Mengingat bahwa dunia bermain merupakan dunia anak-anak, maka sudah kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Semakin tinggi tingkat berbahasa dan komunikasi anak, akan semakin tinggi tingkat kecerdasan anak.

d. Membantu anak sukses disekolah

Pentingnya pendidikan anak sejak usia dini dan membantu anak agar sukses disekolah, mengatasi anak yang tidak mau sekolah merupakan sesi keempat dalam modul pengasuhan dan pendidikan anak, Pada sesi ini KPM diajak untuk menjalin komunikasi dengan pihak sekolah demi kepentingan pendidikan anak.

2. Modul Kesehatan dan Gizi (KG)

Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan pada masyarakat. Setiap tahun di seluruh dunia diperkirakan 4 juta bayi meninggal pada tahun pertama kehidupannya dan dua pertiganya meninggal pada bulan pertama. Penyebab kematian pada minggu

pertama kehidupan adalah komplikasi kehamilan dan persalinan, seperti Asfiksia, Sepsis , dan komplikasi berat lahir rendah (Depkes, RI tahun 2008), Untuk itu, pengetahuan tentang kesehatan ibu dan bayi menjadi sangat penting untuk disampaikan, terutama pada masyarakat yang dirasa sangat minim informasi tentang hal tersebut. Dan KPM merupakan sasaran dalam menginformasikan hal ini.

a. Pentingnya gizi dan layanan kesehatan bagi ibu hamil

Pada sesi ini orang tua diharapkan memperhatikan pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, dimulai dari kehamilan 9 bulan sampai dengan 2 tahun pertama sejak anak dilahirkan. 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode penting dimana gangguan kesehatan muncul pada masa ini yang berakibat secara menetap dan sulit untuk diperbaiki. Materi ini diberikan agar KPM dapat mengetahui dan mempraktikkan asupan gizi seimbang dan perilaku hidup bersih dan sehat.

b. Pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita

Kesehatan anak di tentukan sejak dalam kandungan, dimana hal ini ditentukan oleh asupan seorang ibu hamil,dalam hal ini KPM diingatkan kembali tentang pentingnya memperhatikan makanannya untuk tumbuh kembang bayi dan tidak melupakan minum tablet tambah darah, memberikan ASI eksklusif kepada anaknya dan pentingnya asi pada bayi hingga usia 2 tahun. KPM juga diharapkan untuk bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan

dalam proses persalinan termasuk memahami penyebab persalinan yang beresiko.

c. Kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan

Pada sesi ini, KPM memahami pentingnya menerapkan pola hidup bersih dan sehat, termasuk pentingnya cuci tangan pakai sabun, pentingnya BAB di jamban, serta memahami kesakitan pada anak yang dapat menyebabkan gangguan dan bagaimana mencegah dan menanggulangnya.

3. Modul Pengelolaan Keuangan Keluarga (PKPU)

a. Mengelola keuangan keluarga

Sesi ini ditujukan agar KPM dapat mengasah keterampilan dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran keluarga dimana sesi ini mencakup cara-cara seperti: menghitung rata-rata pendapatan, pengeluaran, serta membuat anggaran bulanan berdasarkan prioritas pengeluaran, mengendalikan pengeluaran, termasuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Pada sesi ini KPM diajak untuk berinteraksi melalui pelatihan-pelatihan soal yang di kerjakan baik pada saat FDS berlangsung dan di rumah sebagai PR. Dengan sering memberikan pelatihan melalui soal menghitung keuangan, diharapkan nantinya KPM terbiasa menyeimbangkan keuangan keluarga dengan belajar berhitung pemasukan dan pengeluaran keluarga.

b. Cermat Meminjam dan menabung

Pada sesi cermat meminjam dan menabung bertujuan untuk peningkatan kesadaran KPM agar berhati-hati dalam meminjam, memilih tempat meminjam yang tepat sehingga tidak terjebak hutang dan kesadaran KPM akan pentingnya menabung secara rutin dan disiplin sebagai salah satu cara untuk mengurangi kemungkinan berhutang kembali.

c. Memulai usaha

Dalam sesi ini KPM dibantu untuk memulai, mengembangkan, dan memantau keberlanjutan usaha agar dapat menjadi sumber pendapatan keluarga. Adapun langkah perencanaan usaha yang dipelajari meliputi: mengidentifikasi, mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha, merencanakan keuangan dan pemasaran usaha serta mengelola usaha dalam modul keuangan dan perencanaan usaha.

4. Modul Perlindungan Anak

Berdasarkan hasil observasi peneliti yang merupakan pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Brebes, di Desa Jagalempeni sendiri marak kasus anak putus sekolah, pergaulan bebas, perilaku anak menyimpang lainnya seperti kekerasan seksual yang terjadi di kalangan anak usia sekolah. Untuk itu, pemerintah sendiri aktif mengkampanyekan gerakan anti kekerasan dan kejahatan anak melalui

kegiatan FDS yang dilakukan oleh pendamping sosial. Dalam materi ini KPM mampu menerapkan materi tentang perlindungan anak.

a. Pencegahan kekerasan terhadap anak

Kekerasan pada anak merupakan salah satu perilaku negatif yang kepada anak akan menyebabkan dampak negatif baik secara fisik, mental, seksual, psikologi, termasuk penelantaran dan perilaku buruk yang merendahkan martabat anak.

b. Pencegahan penelantaran dan eksploitasi terhadap anak

Penelantaran anak merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang tua dengan tidak memberikan hak dan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar anak termasuk kasih sayang terhadap anak. Sedangkan eksploitasi merupakan pemanfaatan untuk memperoleh keuntungan materil maupun immaterill.

5. Kesejahteraan Sosial (Kesos)

a. Pelayanan bagi penyandang disabilitas berat

Materi pada sesi ini membahas ragam disabilitas dan tingkatannya, pelayanan bagi disabilitas berat di dalam keluarga, dan masyarakat.

b. Pentingnya kesejahteraan lanjut usia

Pada sesi lansia, KPM diharapkan lebih paham pengertian lansia, kondisi permasalahan yang umum dijumpai pada lansia, dan alternatif penanganan permasalahan lansia

2.2.4.2 Tujuan Modul *Family Development Session*

1. Modul Pengasuhan dan Pendidikan Anak
 - a. Membantu ibu memiliki konsep diri yang baik sebagai orang tua, meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan mengurangi perilaku kekerasan terhadap anak.
 - b. Membantu orang tua untuk dapat menghargai anak dan mengetahui dampak negatif kekerasan terhadap anak.
 - c. Memberikan pemahaman arti bermain bagi anak
 - d. Mendorong orang tua untuk terlibat aktif dalam pendidikan anak di sekolah
2. Modul Keuangan dan Perencanaan Usaha
 - a. Membantu ibu mengelola keuangan dengan mempelajari prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan kebutuhan dengan keinginan, pendapatan dengan pengeluaran.
 - b. Membantu ibu untuk memiliki tujuan keuangan dan mencapainya dengan menabung dan mengetahui strategi meminjam.
 - c. Mendorong ibu untuk menambah keuangan keluarga melalui usaha kecil dan strategi bagaimana memulai usaha tersebut.
3. Modul Kesehatan dan Gizi
 - a. Membantu ibu mengetahui pentingnya 1000 hari pertama kehidupan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

- b. Mengetahui kebutuhan gizi ibu hamil dan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan selama kehamilan, bersalin dan nifas.
 - c. Mengetahui pentingnya MPASI yang berkualitas
 - d. Mengenali erilaku hidup bersih dan sehat.
4. Modul Perlindungan Anak
- a. Mengenali perilaku kekerasan kepada anak dan pencegahannya
 - b. Mengenali perilaku penelantaran dan pencegahannya.
5. Modul Kesejahteraan Sosial
- a. Membantu keluarga mengidentifikasi kebutuhan penyandang disabilitas berat dalam keluarga maupun masyarakat.
 - b. Membantu keluarga mengenali kebutuhan lansia dan bagaimana memperlakukan lansia dengan tepat.

2.2.4.3 Tempat Pelaksanaan *Family Development Session*

- a. Dapat dijangkau dengan mudah oleh KPM
- b. Memadai untuk menampung semua KPM
- c. Memadai untuk menyajikan dan menampilkan materi pembelajaran
- d. Tidak berlokasi di dekat keramaian yang mengganggu pertemuan (jalan, pasar, sekolah)
- e. FDS dapat dilaksanakan di tempat fasilitas umum seperti ruangan pertemuan aula kelurahan, rumah KPM, sekolah, dan lain-lain dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

2.2.4.4 Waktu Pelaksanaan *Family Development Session*

- a. Pertemuan FDS diselenggarakan minimal 1 kali dalam sebulan.
- b. Satu sesi disampaikan dalam 1 kali pertemuan.
- c. Penyampaian sesi FDS berlangsung sesuai panduan modul (120 menit).
- d. Waktu penyelenggaraan FDS dapat ditentukan sesuai kesepakatan antara KPM dengan pendamping sosial.
- e. Modul fds saat ini terdiri dari 14 sesi, jika 14 sesi sudah disampaikan, Pendamping soisal harus mengulangi embali pemberian materi untuk mengingatkan KPM.

2.2.4.5 Peserta *Family Development Session*

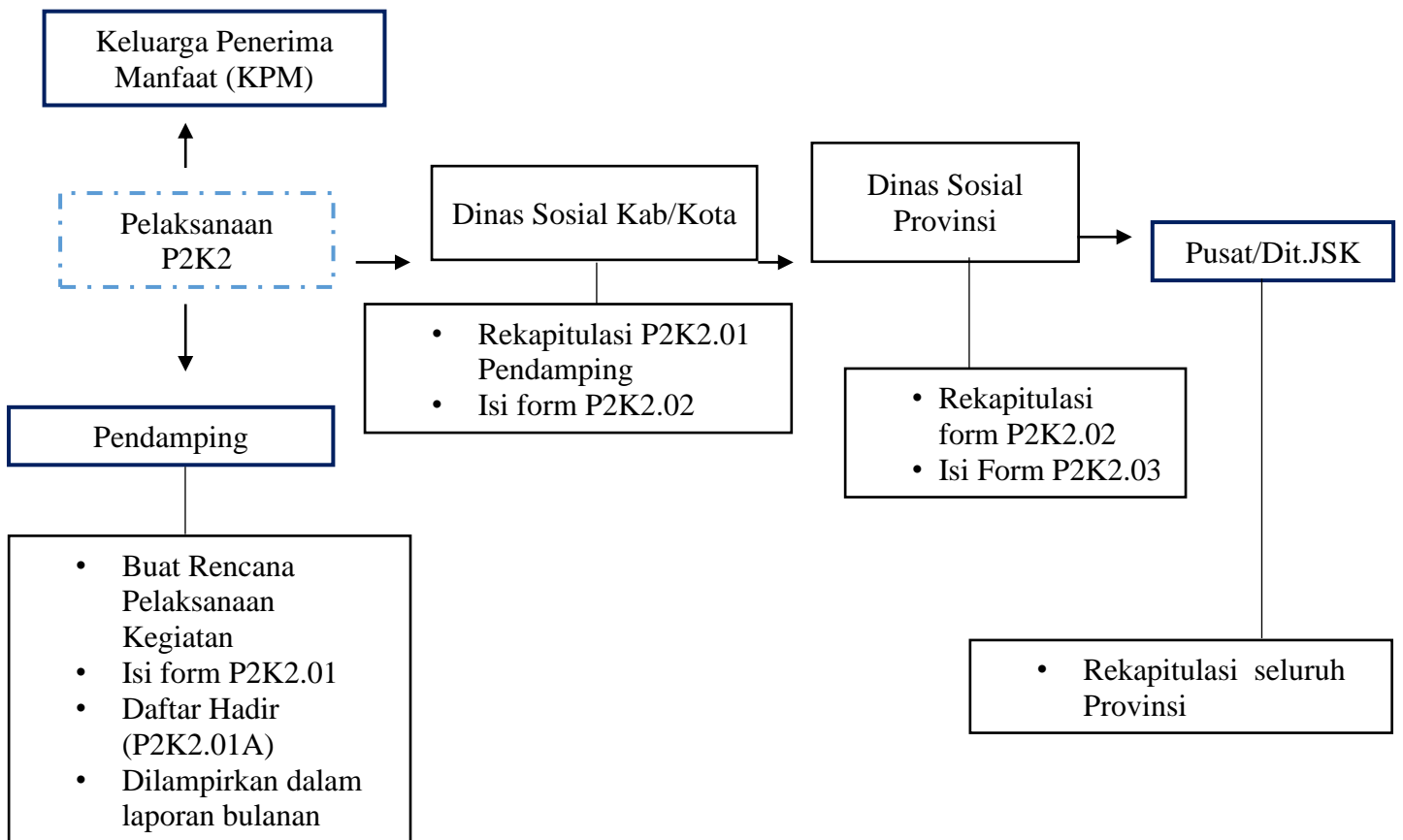
- a. Peserta FDS adalah seluruh KPM PKH yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.
- b. Untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, jumlah peserta FDS tidak lebih dari 30 KPM dalam satu pertemuan.

2.2.4.6 Alat Bantu Ajar *Family Development Session*

- a. Peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan FDS adalah:
modul bagi pendamping, buku pintar untuk KPM, brosur, poster, flipcart, film, alat permainan (kartu, papan permainan)
- b. Peralatan audio visual pendukung berupa laptop, speaker, dan alat tulis

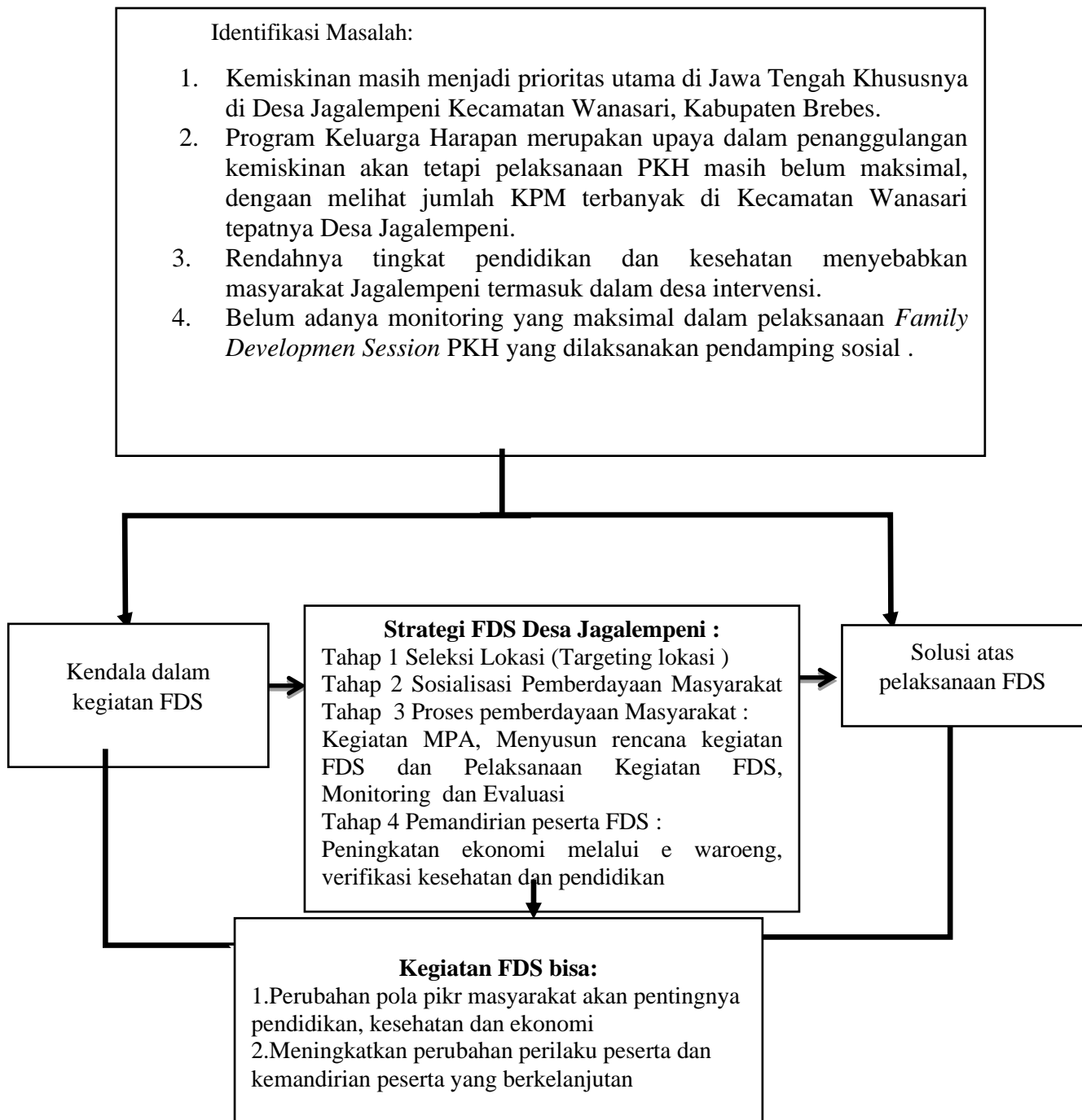
2.2.4.7 Pelaporan Pelaksanaan *Family Development Session*

Pelaksanaan FDS yang dilakukan pendamping dilaporkan setiap bulan berjalan secara berjenjang dari tingkat kecamatan sampai pusat direktorat jendral perlindungan dan jeminan sosial, Adapun alurnya sebagai berikut:



Tabel 2.1 Pelaporan FDS

Berdasarkan gambar diatas setelah pendamping melaksanakan FDS kepada KPM, Kemudian pendamping melaporkannya kepada Dinas Sosial Kabupaten Brebes berupa rekapitulasi dari 17 Kecamatan kemudia laporan tersebut diterukan ke Provinsi, kemudian di teruskan ke Pusat/ Dit.Jendral Jaminan Sosial Keluarga.



2.3 Kerangka Berfikir

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui observasi, pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, penelitian dengan judul “Strategi *Family Development Session* Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi FDS dalam pemberdayaan masyarakat Desa Jagalempeni melalui 4 tahapan yaitu , tahap pemilihan lokasi/wilayah, tahap kedua sosialisasi kegiatan FDS, tahap ketiga proses pemberdayaan melalui identifikasi permasalahan dan potensi peluang yang dimiliki masyarakat Desa Jagalempeni melalui kegiatan partisipasi masyarakat dalam bentuk MPA, menyusun kegiatan pertemuan FDS, menerapkan rencana kegiatan FDS, memantau proses hasil kegiatan FDS dan tahap keempat pemandirian masyarakat melalui ewaroeng.
2. Keberhasilan peserta FDS terjadi peningkatan keterampilan pada peserta, dari sisi pengasuhan dan pendidikan anak, peserta FDS sudah mengalami perubahan dalam pengasuhan anak, menyadari akan pentingnya kerjasama dalam pengasuhan anak, menghindari konflik dihadapan anak, mengurangi perilaku buruk dihadapan anak, tidak menganggap bahwa rendahnya penghasilan bukan berarti peserta tidak bisa menjadi orangtua yang lebih

baik, hal tersebut juga dapat dilihat dari hasil verifikasi komitmen anak peserta di sekolah dan motivasi peserta untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Dari segi kesehatan peserta mengalami peningkatan pengetahuan tentang pentingnya gizi pada ibu hamil dan anak dan dampak yang akan di akibatkan ketika kekurangan gizi, dan peserta juga aktif dalam kegiatan posyandu. Segi ekonomi peserta sudah mulai untuk menabung dan membuat warung bersama dalam upaya peningkatan ekonomi dan penambah kegiatan masyarakat.

3. Kegiatan FDS di Desa Jagalempeni Kecamatan Wanasari ditemukan beberapa kendala yaitu: kurangnya komitmen peserta dalam mengikuti kegiatan FDS, pendamping yang belum diklat FDS dan toolkit FDS yang terbatas, kurangnya sosialisai kegiatan FDS di kalangan masyarakat, peserta FDS yang sudah mandiri tidak mau di graduasi, pendamping disibukan dengan banyaknya administrasi dan bantuan komplementaritas lain.
4. Upaya pencarian solusi atas kendala yang dihadapi dalam kegiatan FDS di Desa Jagalempeni yaitu dengan pemberian sanksi tanggung rentang kepada KPM, mengadakan coaching FDS secara berkala, media promosi FDS, home visit peserta, monitoring berkualitas.

5.2 Saran

1. Bagi pemerintah, *Family Development Session* sudah menunjukkan hasil dari perubahan sikap dan pengetahuan peserta tentang pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang ditunjukkan dalam pengaplikasian dari hasil verifikasi pendidikan kesehatan dan ekonomi. Hendaknya pemerintah tidak menaikan indeks bantuan PKH agar proses pemberdayaan masyarakat melalui FDS berjalan optimal, Sehingga meminimalisir adanya tumpang tindih antara besarnya bantuan dengan perubahan pola pikir peserta yang di bebaskan kepada pendamping sosial.
2. Pengurus PPKH Kab.Brebes dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi semestinya bukan hanya sekadar pengguguran kewajiban, kegiatan FDS ini sangat bagus apabila melibatkan stakeholder dalam setiap modul yang disampaikan, baik dari pendidikan, kesehatan dan ekonomi, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial. Hendaknya pihak PPKH Kab.Brebes menjalin hubungan baik dengan bekerjasama dengan instansi terkait. Terlebih adanya e wareong PKH di sempitkan dengan adanya program pengembangan dari modul ekonomi melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diwajibkan pada setiap kelompok FDS, sehingga kemandirian peserta itu merata dan lebih cepat untuk percepatan pemutus rantai kemiskinan.

3. Bagi Pendamping Sosial pada saat kegiatan FDS yang melibatkan partisipasi masyarakat sudah berjalan baik di PPKH Kab.Brebes akan lebih baik lagi ketika FDS yang dilakukan bukan hanya diperuntukan untuk peserta PKH saja, akan tetapi lebih terbuka untuk non kepesertaan PKH, hal tersebut untuk sosialisasi ke semua masyarakat dan diusahakan tempatnya terbuka seperti di halaman agar kegiatan FDS diketahui masyarakat luas untuk meminimalisir kecemburuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2008). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ahmadi, R. (2012). Pemberdayaan Masyarakat Miskin : Pendekatan Modal Manusia. *DIA, Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 16–31.
- Alfitri. (2011). *Community Development Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwas, O. M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Basleman, A., & Mappa, S. (2011). *Teori Belajar Orang Dewasa*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Beni, S., & Manggu, B. (2018). JURKAMI : Jurnal Pendidikan Ekonomi. *JURKAMI Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 3(2), 151.
- Cahyono, S., & Iryani, S. (2018). Gerak Langkah Program Keluarga Harapan : Kontribusi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat The Action Step Of Expected Family Program : The Contribution of Expected Family Program to the Welfare Improvement of Beneficia. *Sosio Konsepsia Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 17(4). Retrieved from

<https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/jpks/article/view/1608>

- Chambers, R. (1983). *Rural Development, Putting the Last First*. London: Longman.
- Chambers, R. (1995). *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Count? dalam Uner Kirdar and Leonnard Silk (ed). People From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University.
- Djumiarti, T. (2005). Strategi pengentasan kemiskinan : potret keberhasilan pembangunan. "Dialogue", *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik (JIAKP)*, 2(3), 884–897.
- Ekatiningsih, P. D. (2016). *Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Family Development Session Bagi Pendamping Di Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Erwin. (2015). Model Pemberdayaan Masyarakat Mentawai Melalui Penguatan Kelembagaan Lokal Di Pulau Siberut (Empowerment Model Of The Poor In Mentawai Through Local Institutions Siberut Island). *Sosio Konsepsia Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 4(2), 1–14
- Evi Rahmawati, Bagus Kisworo. 2017. "Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan". *Journal of Non formal Education and Community Empowerment*. Volume 1 (2): 161-169.
- Friedmann, J. (1979). Urban Poverty in Latin America; Some theoretical Consideration Dalam: *Development Dialouge*. Upsala: Dag Hammarskjold Foundation. (p. 20).
- Frivaldo, F. S. (2012). The Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps): Improving Human Capital And Breaking Intergeneration Cycle Of Poverty In The Philippines. *Polytechnic University of the Philippines*.

- Ghony, M. D. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Gosh, A. K. (2013). Employee Empowerment: A Strategic Tool to Obtain Sustainable Competitive Advantage. *International Journal of Management*, 30(3), 96.
- Hikmat, H. (2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Ismayilova, L., Ssewamala, F., & Huseynli, A. (2014). Children and Youth Services Review Reforming child institutional care in the Post-Soviet bloc: The potential role of family-based empowerment strategies. *Children and Youth Services Review*, 47, 136–148. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2014.09.007>
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidessindo.
- Kindervatter, S. (1979). *Nonformal Education as an Empowering Process with Case Studies from Indonesia and Thailand*. Amherst, Massachusetts: University of Massachusetts Amherst. Retrieved from https://scholarworks.umass.edu/cie_nonformaleducation/1
- Kuntoro, S. A. (2006). Pendidikan Nonformal (PNF) Bagi Pengembangan Sosial. *Jurnal Ilmiah VISI PTK-PNF*, 1(20), 14–18.
- Kurniawati, R., & Nurhalim, K. (2017). Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Dalam Pengelolaan Limbah Plastik. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 2(1), 1–14.
- Lenggogeni, S., & Iyan, R. Y. (2012). Analisis prioritas penanggulangan kemiskinan menurut kabupaten/kota di provinsi riau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 3(7), 71–87. Retrieved from <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JSEP/article/view/1287/1277>

- Lister, R. (2010). *Poverty*. Cambridge: Polity Press.
- Malik, A., & Mulyono, S. E. (2017). Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal melalui Pemberdayaan Masyarakat. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 1(1), 87–101.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mbizvo, M. T., & Phillips, S. J. (2014). SC. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2014.04.014>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Miradj, S., & Sumarno. (2014). The Empowerment Of The Poor Through The Non-Formal Education Process As An Effort To Improve The Social Welfare In West Halmahera Regency. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 101–112.
- Moeljarto. (1995). *Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Mohan, K., & Gomathi S. (2014). A Study on Empowering Employee Capabilities Towards Organizational Excellence. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(20), 557–562. <https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n20p557>
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mughofar, M. N. K., Suwandi, S., & Subiantoro, S. (2019). The Portrait of Directive Speech Act in Family Development Session. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 3(8), 88–92.

- Mughofar, M. N. K., Suwandi, S., & Subiyantoro, S. (2018). Tindak Tutur Direktif Dalam Family Development Session (FDS). *Jurnal Pesona*, 4(2), 10–19.
- Muhtar, & Huruswati, I. (2015). Pelayanan satu pintu Penanggulangan Kemiskinan Di Sragen. *Sosio Konsepsia Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 5(1), 277–291.
- Mulyono, S. E. (2017). *Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ombak.
- Mulyono, S. E. (2017). Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang. *EDUKASI*, 2(1), 1–10.
- Murib, J., & Parojow, O. dkk. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Ranotana Weru. *Agri-SosioEkonomi Unsrat*, 14(1), 295–300.
- Muslikhah, Kamil, M., & Kamarubiani, N. (2018). The Implementation of Adult Learning Assumption Readiness Relationships in Improving the Effectiveness of Learning Process. *Journal of Nonformal Education*, 4(229), 141–150.
- Musthofa, B. M., & Gunawijaya, J. (2015). Strategi Keberhasilan Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Kreativitas Seni Tradisi: Studi Kasus Saung Angklung Udjo, Bandung, Jawa Barat. *Sosio Konsepsia Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 5(1), 325–339.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (1998). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasmawati, D. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Ternak Ayam Broiler Dalam Meningkatkan Wirausaha Di PKBM Abdi Pertiwi Kelurahan Pipitan Kecamatan Walantaka Kota Serang. *Universitas Sultan Agung Tirtayasa*, 1(1), 60–66.

- Nataya, E. J., & N, S. S. (2017). Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Melalui Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. *Jurnal Sosiologi DILEMA*, 32(2), 1–9.
- Ningrum, D. A. (2017). Peran Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Mengatasi Kemiskinan Di KUBE Sejahtera Desa Giripurno, Ngadirejo, Temanggung. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, VI(8), 674–682. Retrieved from <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/pls/article/viewFile/8479/8078>
- Nurhayat, R. (2016). *Pengaruh Pendekatan Andragogi Terhadap Keterampilan Peserta Diklat Family Development Session 2015 Di BBPPKS Regional II Bandung*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Pambid, R. C. (2017). Level of Application of Family Development Session to Pantawid Familyang Pilipino Program (4P ' s) Beneficiaries. *PSU Journal of Education, Management and Social Sciences*, 1(1), 16–25.
- Payne, M. (1997). *Modern Social Work Theory*. London: Macmillan Press Ltd.
- Permana, A., & Sasmito, C. dkk. (2018). Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Keluarga Harapan Untuk Memutus Rantai Kemiskinan (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(2), 64.
- Prastowo, A. (2011). *Metode Penelitian dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar ruzz Media.
- Pudjianto, B., & Syawie, M. (2015). Kemiskinan dan pembangunan manusia. *Sosio Informa Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 1(3), 231–246.
- Putri, A. T. K. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan Studi Pada Kegiatan Family Development Sessions Di Desa Manduro Manunggalgajah, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.

Publika, 4(1). Retrieved from jurnalmahasiswa.unnesa.ac.id

Raharjo, T. J., Suminar, T., & Mu'arifuddin. (2016). Peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pendidikan NonFormal Di Jawa Tengah. *Journal of Nonformal Education*, 2(1).

Ras, A. (2013). Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan. *SOCIUS Jurnal Sosiologi*, XIV, 56–63. Retrieved from journal.unhas.ac.id

Reddy, B. S., Salk, H., & Nathan, K. (2013). Energy in the development strategy of Indian households — the missing half. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 18, 203–210. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.10.023>

Rifa'i, A. (2009). *Desain Sistematis Pembelajaran Orang Dewasa*. Semarang: Unnes Press.

Rozak, P., Hasan, H., Sugarno, & All, E. (2016). Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Desa Danasari Kecamatan Pemasang Kabupaten Pemasang. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36(1), 26–44.

Sahroni, M. (2011). *Orang Miskin Bukan Orang Bodoh*. Yogyakarta: Bahtera Buku.

Satori, D. A. . (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Shardlow, S. (1998). "Values, Ethics and Social Work" dalam Adams, Robert., Lena Dominelli dan Malcolm Payne (eds). *Social Work: Themes, Issues and Critical Debates*. London: Macmillan Press Ltd.

Soetomo. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Solikhatun, Supono, & Masruroh, Y. (2014). Kemiskinan Dalam Pembangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi; Kemiskinan; Program Pembangunan*, 3(1), 75.

- Sopandi, A. (2010). Strategi Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Strategi Dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Kybernan*, 1(1), 41–55.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto, E. (2013). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat, Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suradi. (2012). Pendekatan Kelompok Sebagai Modalitas Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Group Approach As Modalities In Poverty Alleviation). *Sosio Informa Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 17(2), 65–74.
- Susantyo, B. dkk. (2018). *Optimalisasi Peran dan Fungsi Pendamping Sosial Studi di Empat Kota Di Indonesia*. Jakarta Timur: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Retrieved from <https://puslit.kemsos.go.id/hasil-penelitian/440/optimalisasi-peran-dan-fungsi-pendamping-sosial>
- Susantyo, B., & Nainggolan, T. (2018). Integrasi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan. *Quantum Jurnal Kesejahteraan Sosial BBPPKS Regional I Sumatera Kementerian Sosial RI*, XIV(200), 73–84. Retrieved from <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Quantum/article/view/1723>

- Sutarto, J., Mulyono, S. E., Nurhalim, K., & Pratiwi, H. (2018). Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Kecakapan Hidup Berbasis Keunggulan Lokal Desa Wisata Mandiri Wanurejo Borobudur Magelang. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 35(1), 27–40.
- Suyanto, & Mujiyadi, B. (2015). Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Melalui Pelayanan Terpadu Di Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Sosio Konsepsia Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 4(2), 15–36.
- Syawie, M. (2011). Kemiskinan dan kesenjangan sosial. *Sosio Informa Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 16(3), 213–219.
- Teguh, A. (2004). *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Tohani, E., Prasetyo, I., & Suharta, R. B. (2019). Women Empowerment in Disaster Vulnerable Village Through Vocational Life Skill Education Based on Utilization of Local Potential. *Journal of Nonformal Education*, 5(1), 35–46.
- Wahyuni, R. N. T., & Damayanti, A. (2014). Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kemiskinan di Provinsi Papua: Analisis Spatial Heterogeneity Poverty-Causing Factors in Papua Province: Spatial Heterogeneity Analysis Pendahuluan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 14(2), 128–144.
- Yusuf, A. (2014). Analisis kebutuhan pendidikan masyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 31(2), 77–84.
- Zastrow, C. (2004). *Introduction to Social Work and Social Welfare* (Eight Edit). Pacific Grove: Brooke/Cole Publishing Company.

LAMPIRAN

Lampiran 1

**HASIL WAWANCARA DENGAN KOORDINATOR PPKH KABUPATEN
BREBES**

No. Responden : 01

Identitas Responden

Nama : Hendrik Maulana
 Pekerjaan : Koordinator PPKH Kabupaten Brebes
 Waktu dan tempat wawancara : Senin, 27 Januari 2020 Bertempat di Ruang
 Bansos Dinas Sosial Kabupaten

No	Pertanyaan	Deskripsi
1.	Apa yang anda ketahui tentang FDS?	FDS merupakan kegiatan yang wajib dilakukan pendamping setiap bulan di wilayah dampungannya masing-masing dengan tujuan agar merubah pola pikir masyarakat agar sadar akan pentingnya kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial lainnya. Ada beberapa modul yang harus disampaikan kepada pendamping, pertama modul pengasuhan dan pendidikan anak, modul kesehatan dan gizi, modul perencanaan keuangan dan perencanaan usaha, perlindungan anak, dan terakhir modul kesejahteraan sosial yaitu materi tentang lansia dan disabilitas.
2.	Sejak kapan mulai pelaksanaan FDS di Kabupaten Brebes?	Sejak tahun 2014 di uji cobakan di Kab.Brebes dan pada tahun 2015 pendamping mulai melaksanakan FDS, sejak itu awal pertama ada FDS bersama UNICEF untuk percontohan untuk kegiatan
3.	Bagaimana sosialisasi yang Bapak lakukan sebagai koordinator kabupaten dalam pelaksanaan FDS kepada pendamping?	Sosialisasi juga dilakukan melalui rapat kordinasi dengan stakeholder lain, yaitu dari dinas pendidikan, kesehatan, BPS, Dinduk Capil, dari level kecamatan sosialisasi juga dilakukan oleh pendamping dengan berkoordinasi dengan camat kecamatan dampungannya sampai pada level bawah penerima manfaatnya, jadi sosialisasi yang dilakukan memang berjenjang.

4.	Bagaimana proses pelaksanaan FDS kepada Peserta PKH?	Proses pendataan Peserta FDS dimuali dengan pertemuan kelompok, perkenalan dengan semua anggota dari peserta FDS kemudian melakukan MPA terlebih dahulu atau analisis keadaan/ kondisi peserta FDS sesuai dengan partisipasi masyarakat jadi sebelum memulai FDS, peserta akan diskusi tentang masalah terbanyak yang dialami oleh anggota tersebut. Setelah itu kita menentukan 3 masalah terbanyak yang jadi prioritas di kelompok tersebut, barulah pendamping merencanakan rencana kapan akan dilakukan FDS modul PPA misal, dan tujuan apa yang akan di capai pada modul tersebut, lalu pendamping berdiskusi tempat yang akan di gunakan untuk kegiatan FDS.
5.	Kendala-kendala apa saja yang dialami dalam pelaksanaan FDS di Kabupaten Brebes?	Kendala dalam pelaksanaan FDS di Kabupaten Brebes antara lain masih ada Peserta FDS yang tidak mengikuti FDS/ tidak komitmen, sehingga masih banyak peserta dengan status non komitmen, padahal ststusnya memang tidak mampu tapi peserta menganggap remeh kegiatan FDS artinya peserta tidak mempunyai minat/ motivasi baik motivasi untuk mengetahui bagaimana sih agar anak-anak sukses di sekolah, bagaimana mengetahui pentingnya gizi bagi balita dan ibu hamil atau bagaimana cara pintar seorang ibu dalam mengelola keuangan keluarga.

**HASIL WAWANCARA DENGAN KORDINATOR PPKH
KECAMATAN WANASARI**

No. Responden : 02

Identitas Responden

Nama : Komarudin

Pekerjaan : Korcam PKH Kec.Wanasari

Waktu dan tempat wawancara : Senin, 24 Februari 2020 Bertempat di Sekretariat PPKH Kecamatan Wanasari

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah yang anda ketahui tentang FDS?	FDS merupakan kegiatan pemberian materi kepada KPM, yang terstruktur dan sistematis sesuai dengan panduan dari balai diklat BBPPKS. Yang terdapat berbagai modul.
2	Sejak kapan mulai pelaksanaan FDS di Kabupaten Brebes?	Pelaksanaan FDS di Kabupaten Brebes sudah dimulai sejak tahun 2014 yang awalnya merupakan uji coba dari kemenkes dan UNICEF dan 2015 mulailah kita ada diklat tentang modul kesehatan dan gizi dan seiring berjalannya waktu, FDS saat ini menjadi ciri khas nya PKH.
3	Bagaimana sosialisasi FDS di Kecamatan Wanasari?	Sosialisasi FDS dilakukan dengan Kepala Desa, Camat, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Sosialisasi dilaksanakan melalui rapat kordinasi. Sosialisasi juga dilakukan pada saat serta pertemuan kelompok.
4	Apa tujuan pelaksanaan FDS?	Tujuan pelaksanaan FDS secara umum adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengubah perilaku kpm, mendukung upaya peningkatan kesejahteraan, dan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.
5	Bagaimana proses pelaksanaan FDS di Kecamatan Wanasari	Pertama, pendamping melakukan pencarian data terlebih dahulu dengan melaksanakan asesment partisipatif, tujuannya agar pendamping mempunyai data awal permasalahan

		<p>terbanyak yang dialami oleh KPM a tersebut apa, dan KPM mempunyai potensi apa agar bisa di gunakan untuk memecahkan masalahnya. Kedua, setelah MPS, dan kita dapati 3 prioritas utama masalah terbanyak, pendamping yang jelas itu menentukan rencana kapan akan dilakukan FDS, dimana tempatnya, Ketiga barulah kita menyiapkan toolkit dan alat lainnya untuk memulai intervensi dengan melaksanakan FDS sesuai hasil MPA.</p>
6	<p>Kendala-kendala apa saja yang dialami dalam pelaksanaan FDS di Kabupaten Brebes?</p>	<p>Kendala yang dialami dalam pelaksanaan antara lain masih ada KPM yang tidak hadir di pertemuan kelompok FDS, dan juga dari pendamping sendiri sekarang banyak disibukan masalah administrasi sehingga yang tadinya sudah membuat rencana pelaksanaan kegiatan FDS, jadi terundur bahkan sampai tidak terealisasi.</p>

**HASIL WAWANCARA DENGAN PENDAMPING SOSIAL KABUPATEN
BREBES**

No. Responden : 03

Identitas Responden

Nama : Nurul Khotimah

Pekerjaan : Pendamping PKH Kabupaten Brebes

Waktu dan tempat wawancara : Rabu, 11 Desember 2019 di Desa Jagalempeni

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang Ibu Pendamping Sosial Desa Jagalempeni ketahui tentang FDS?	FDS yang saya ketahui adalah kegiatan yang diberikan kepada keluarga sangat miskin atau KPM (keluarga penerima manfaat) yang memiliki kategori ibu hamil, balita, SD, SMP, SMA dan juga lanjut usia minimal berusia 70 tahun serta disabilitas berat dalam bentuk pendidikan untuk mengubah pola pikir masyarakat agar lebih memiliki kehidupan yang lebih baik dalam lingkup keluarga, kesehatan, ekonomi dan sosial masyarakat sehingga mampu untuk mengaplikasikan baik dalam keluarga maupun masyarakat.
2	Apa tujuan pelaksanaan FDS?	Tujuan FDS untuk merubah pola pikir masyarakat agar sadar akan pentingnya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
3	Sejak kapan mulai pelaksanaan FDS di Desa Jagalempeni?	FDS di Desa Jagalempeni dimulai sejak tahun 2015 akan tetapi saya mendampingi KPM tersebut dari tahun 2018 hingga saat ini KPM mengalami banyak perubahan, ada yang keluar dari kepesertaan karena sudah mandiri, mengundurkan karena kesadarannya sendiri,.

4	Bagaimana Ibu pendamping sosial melakukan FDS untuk meningkatkan kemandirian KPM Desa Jagalempeni?	Melalui pemberian modul pengelolaan keuangan dan perencanaan keluarga melalui tahapan sesi yang ada di modul kemudian mengarahkan KPM untuk mengaplikasikan dalam kehidupan seperti menabung, dan berwirausaha yang dapat meningkatkan pendapatan KPM sehingga KPM bisa mandiri dan sejahtera.
5	Strategi yang pendamping sosial lakukan pada saat kegiatan FDS?	Dengan melakukan FDS rutin tiap bulannya dan mengingatkan KPM untuk mempraktekan apa yang sudah dipelajari bersama, dari situ saya melakukan evaluasi kegiatan FDS yang sudah saya lakukan selain masukan dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak kabupaten terhadap dampingan saya.
6	Bagaimana sosialisasi kegiatan FDS di Desa Jagalempeni?	Sosialisasi dilakukan dengan Kepala Desa, Camat dan instansi terkait. Sosialisasi juga dilakukan pada saat pertemuan awal saat penentuan KPM dan sosialisasi juga dilakukan rutin kepada KPM setiap bulan melalui kegiatan FDS. Akan tetapi untuk sosialisasi bagi non KPM yang protes dan ingin mengetahui kegiatan FDS, biasanya saya suruh non KPM tersebut untuk mengikuti kegiatan FDS, tujuannya agar mengetahui kegiatan bulanan bukan pencairan dan sekaligus menambah pengetahuan non KPM tersebut terhadap materi yang saya sampaikan, entah tentang anak dan keluarga, ekonomi, dan lainnya.

7	Bagaimana proses pada saat pelaksanaan fds?	Pertama mengidentifikasi masalah paling banyak pada kelompok tersebut, atau mengidentifikasi masalah berdasarkan partisipasi KPM melalui MPA , kemudian baru saya menentukan materi yang akan dibahas berdasarkan hasil dari identifikasi masalah tersebut, setelah itu saya menyampaikan materi dari modul FDS, berdiskusi pengalaman KPM , memanfaatkan toolkit yang ada baik dari flipchart, video sesuai sesi pembahasan , dan ice breaking agar KPM tidak merasa jenuh mengikuti kegiatan FDS.
8	Modul apa saja yang anda berikan kepada KPM?	Modul Pendidikan dan Pengasuhan anak (PP), Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha (PKPU) dan Kesehatan dan Gizi (KG)
9	Bagaimana output dari FDS dari modul yang sudah disampaikan?	<p>Anak KPM yang memiliki anak sekolah, aktif di sekolahnya, dilihat saat saya rutin menemui guru BK saat verifikasi ke sekolah, dan KPM yang mempunyai balita rajin ke posyandu, saya cek pada saat jadwal posyandu dan rutin menemui bidan setempat untuk koordinasi.</p> <p>Perubahan yang dirasakan adalah perubahan perilaku peserta FDS yang kurang mendukung upaya peningkatan kesehatan menjadi rajin berkunjung ke fasilitas kesehatan untuk memerikasakan kehamilan dan cek kesehatan serta Peserta FDS yang sebelumnya kurang kesadaran di bidang pendidikan menjadi sadar akan pentingnya pendidikan dengan mnyekolahkan anak-anaknya</p>

10	Apakah kegiatan FDS yang pendamping lakukab melibatkan pihak lain?	Iya, saat FDS biasanya saya mengajak bidan setempat untuk memaparkan modul kesehatan dan gizi yang tentunya saya menyesuaikan jadwal dari bidan tersebut. Selain itu juga saya mengajak rekan saya yang lulusan ekonomi untuk menjelaskan modul ekonomi untuk menyampaikan materi ke peserta FDS, alasan saya mengajak pigak lain agar KPM tidak jenuh dengan saya,karena kalau sama saya ketemu setiap bulan, dan agar ilmu yang di dapat lebih jelas karena dari pembicara yang fak d bidangnya.
11	Kendala yang dihadapi ketika pelaksanaan FDS/?	<p>Ada, Maih banyak KPM yang tidak hadir dalam pelaksanaan FDS, belum lagi KPM yang tidak fokus saat pemberian materi yang saya berikan dan ada juga yang hanya fokus pada saat saya memberikan ice breakingnya saja. Kurangnya komitmen dari KPM dalam mengikuti FDS yang dipengaruhi oleh minat dan kemauan yang besar dari KPM untuk berubah karena masih terjebak pada budaya malas sehingga ada saja KPM sering tertinggl materi FDS adanya Peserta FDS juga digunakan untuk sarana pendekatan bagi peserta yang sudah mandiri agar meluluskan diri dari kepesertaan PKH, Karena memang tujuan kegiatan FDS salah satunya untuk meningkatkan pengetahuan atau merubah mindset peserta.</p> <p>Untuk hambatan personal sendiri memang dalam penyampaian mungkin saya kurang maksimal, kalo sesuai arahan FDS ini di kemas menarik ada nonton film sesuai materi, tetapi terkadang terkendala karena jumlah setiap kelompok kisaran 10-30 sedang</p>

		laptop kecil dan belum mempunyai proyektor sehingga kurang maksimal, hanya mengandalkan fliccart yang ada dan itupun kami bergiliran, karena keterbatasan toolkit yang kami miliki.
12	Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan FDS Desa Jagalempeni?	Solusi yang dilakukan oleh Pendamping FDS bagi yang tidak hadir pada pertemuan kelompok adalah melakukan kunjungan rumah atau <i>home visit</i> ke peserta tersebut dan menanyakan alasan ketidakhadirannya. Bagi yang tidak hadir di posyandu dan sekolah Pendamping melakukan monitoring dengan Verifikasi data ke Fasdik dan Faskes jika diketahui tidak komitmen maka Peserta FDS tersebut bantuannya akan ditangguhkan. Pendamping Sosial juga melakukan sosialisasi ke Peserta FDS bahwa Peserta wajib memenuhi kewajiban dengan hadir di Sekolah minimal 85% tiap bulan dan bagi ibu hamil dan balita wajib kunjungan ke fasilitas kesehatan misalnya Polindes, Pustu atau posyandu sekali dalam sebulan.

HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA JAGALEMPENI

No. Responden : 04

Identitas Responden

Nama : Tajudin

Pekerjaan : Kepala desa

Waktu dan tempat wawancara : Kamis, 9 Januari 2020 Bertempat di Balai Desa

No	Pertanyaan	Deskripsi
1.	Apa yang anda ketahui tentang FDS?	Yang saya ketahui FDS kegiatan sosialisasi yang dilakukan pendamping dengan materi yang berbeda dan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam memaknai pentingnya pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
2.	Bagaimana Sosialisasi FDS di Desa Jagalempeni?	Untuk Sosialisasi FDS dilakukan oleh Para Pendamping pada saat awal penetapan menjadi KPM dan Sosialisasi juga berlanjut dilakukan kepada Peserta secara rutin setiap bulan. Tiap kelompok memiliki Ketua yang dipilih melalui kesepakatan bersama kelompok berisikan peserta yang berjumlah sekitar 15-20 Peserta. Akan tetapi untuk masyarakat sekitar banyak yang masih tidak paham dengan FDS, makanya masyarakat yang belum mendapat bantuan mengira kalau setiap bulan KPM mendapat bantuan (cair bantuannya) padahal KPM wajib mengikuti kegiatan FDS yang dilakukan oleh pendamping sosial.
3.	Dalam pelaksanaan FDS di Desa Jagalempeni, kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan?	Kegiatan FDS di Desa yang sudah dilaksanakan dan masih berjalan pemberian materi tentang kesehatan dan gizi, pengasuhan anak, ekonomi dll, selain itu, pendamping Koordinasi dengan Saya selaku Kepala Desa, terkait masalah data graduasi FDS, Kunjungan ke posyandu, Kunjungan ke sekolah-sekolah, termasuk ketika ada penambahan peserta baru.
4.	Adakah perubahan kondisi warga di Desa Jagalempeni setelah adanya kegiatan FDS?	Yang jelas Perubahan kondisi warga kami p di Desa setelah mendapatkan bantuan jelas ada. Dimana Perubahan secara drastis tidak terlihat hanya saja yang sebelumnya beberapa peserta yang anaknya tidak lanjut sekolah setelah adanya kegiatan FDS jadi mau melanjutkan sekolah .

HASIL WAWANCARA DENGAN BIDAN DESA JAGALEMPENI

No. Responden : 05

Identitas Responden

Nama : Patmawati

Pekerjaan : Bidan

Waktu dan tempat wawancara : Kamis, 6 Februari 2020 bertempat di PKD

No	Pertanyaan	Deskripsi
1.	Apa yang Bu Bidan ketahui tentang FDS?	Sepengetahuan saya FDS merupakan sosialisasi untuk keluarga miskin yang mempunyai balita dan ibu hamil mempunyai kewajiban untuk hadir di posyandu. Agar masyarakat sadar akan pentingnya menjaga kesehatan baik anak dan keluarganya dan mau berbagi pengetahuan kepada masyarakat sekitar selain peserta PKH,terlebih sedang digalakkannya masalah stunting terlebih yang terkena stunting itu dari warga sekitar sini, jadi FDS ini memang bagus sekaligus membantu saya selaku bidan, dan kitapun ketika ada acara seminar atau sosialisasi juga mengajak pendamping sosial sosial
2.	Bagaimana sosialisasi FDS di Desa Jagalempeni?	Sosialisasi FDS di Desa Jagalempeni itu sangat baik oleh pendamping seperti Mbak Nurul, Pak Trisno, Pendamping FDS memberikan sosialisasi lewat pertemuan kelompok dan kordinasi dinas-dinas terkait seperti Bidan di puskesmas sangat baik koordinasinya.
3.	Bagaimana kordinasi antara Pendamping dengan Bidan Desa?	Kordinasi juga sangat baik dilakukan pada saat verifikasi kehadiran peserta ke posyandu, sering juga pendamping membawa kpm nya untuk posyandu, saya juga sering mengisi kegiatan FDS di Desa Jagalempeni tentang kesehatan dan Gizi karena di Desa ini ada anak yang stunting dan termasuk desa intervensi.
4.	Apakah Peserta sudah	Hampir semua sudah hadir. Masih ada

	memenuhi kewajiban dengan hadir di fasilitas kesehatan?	beberapa yang masih malas datang ke posyandu karena ibunya bekerja.
5.	Apakah Pendamping secara rutin melakukan verifikasi data Peserta di fasilitas kesehatan?	Ya tiap ada posyandu pendampingnya rutin datang ke posyandu yang tidak datang akan dikunjungi rumahnya agar mau hadir ke posyandu.
6.	Kendala-kendala apa saja yang dialami dalam pelaksanaan FDS di Desa Jagalempeni?	Kendalanya masih ada yang tidak mau hadir di posyandu padahal hal tersebut baik sekali untuk mengontrol kesehatan keluarga, mengetahui tumbuh kembang anak.ya dengan adanya FDS pelan-pelan menyadarkan masyarakat akan itu.

HASIL WAWANCARA DENGAN GURU SD NEGERI 03

DESA JAGALEMPENI KECAMATAN WANASARI

No. Responden : 06

Identitas Responden

Nama : Ulwiyah

Pekerjaan : Guru

Waktu dan tempat wawancara : Rabu, 6 Februari 2020 bertempat di SD

No.	Pertanyaan	Deskripsi
1.	Apa yang Ibu Ulwiyah ketahui tentang FDS?	FDS merupakan kegiatan memberikan pengajaran kepada KPM agar mengalami peningkatan pengetahuan.
2.	Bagaimana sosialisasi FDS di Desa Jagalempeni?	Sosialisasi sudah baik dilakukan oleh Pendamping di sekolah. Dan dari pendamping sering kali menitipkan anak sekolah yang sekiranya perlu di perhatikan, koordinasi mereka baik di sekolah, jadi antara lingkup sekolah sini saling memperhatikan murid-muridnya.
3.	Bagaimana kordinasi antara pendamping dengan guru-guru di sekolah?	Kordinasi berjalan dengan baik setiap memasuki tahun ajaran baru jika ada anak KPM yang bersekolah disini dibuatkan surat keterangan sekolah yang diberikan kepada pendamping sebagai bukti bahwa anak tersebut bersekolah disini. Pendamping juga sebulan sekali menemui saya untuk mengecek keaktifan anak KPM di sekolah, pendamping sering menitipkan nama dari salah satu murid yang memang bermasalah agar lebih intens dalam pengawasan, kami juga mendiskusikan kondisi anak-anak KPM sekiranya ada anak KPM yang perlu perhatian khusus dalam penanganannya. Dan sering kami lakukan home visit bersama pendamping untuk menemui anak yang sudah lama tidak berangkat sekolah.
4.	Apakah Peserta sudah	Peserta sebagian besar sudah memenuhi kewajiban dengan hadir

	memenuhi kewajiban dengan hadir di Fasilitas Pendidikan?	minimal 85% setiap bulannya walaupun masih ada yang kehadirannya kurang dari 85% tapi tidak banyak biasanya yang kehadirannya kurang akan dilaporkan kepada Pendamping pada saat verifikasi. Jika ada yang tidak masuk sekolah biasanya dikarenakan sakit atau ijin.
5	Adakah perubahan kondisi anak KPM saat di sekolah?	Jelas ada, misal dari peralatan, pakaian, sepatu anak KPM sekarang jauh lebih layak, kalo dulu liat anak kurang mampu pakaian anak sekolahnya memperhatikan sekarang jauh lebih baik, termasuk kehadiran anak di sekolah juga meningkat, yang biasanya KPM itu kan kebanyakan petani, pagi mereka sudah berangkat dalam kondisi anaknya yang belum bangun. Dan yang sering terjadi ketika anak tersebut tidak masuk sekolah, padahal dari pagi dia pamit k orangtua dan saya mengetahui hal tersebut. Biasanya saya menegur orangtua agar anaknya masuk sekolah. Dan KPM mulai ada kepedulian untuk memotivasi, membujuk anaknya agar berangkat ke sekolah
6.	Kendala-kendala apa saja yang dialami dalam pelaksanaan FDS di Desa Jagalempeni?	Kendalanya itu mereka sudah di kasih asupan dengan adanya kegiatan FDS untuk menyadarkan betapa pentingnya pendidikan untuk generasinya akan tetapi ada aja anak yang tidak mau masuk sekolah dan ortunya seperti pasrah saja. Saya paham penerima PKH mbk yang otomatis peserta FDS juga to, ketika anak mereka tidak masuk sekolah, saya pasti bilang ke orangtuanya, sering x pagi orang tua berangkat ke sawah dan dikira anaknya masuk sekolah, padahal tidak. Atau anak sudah pamit ke sekolah kata orangtuanya, tapi kenyataanya tidak masuk, itu masih saya temui permasalahan seperti itu. Tapi hanya

		beberapa KPM saja.
7.	Apa saran anda dalam mengatasi kendala yang dialami dalam pelaksanaan FDS di Desa Jagalempeni?	Saran saya agar Peserta FDS di intenskan lagi dalam sosialisasinya, mungkin perlu juga mengadakannya per uda minggu sekali ya mbk, ataatau dari jumlah kelompoknya yang di sedikitkan.

HASIL WAWANCARA DENGAN KPM DESA JAGALEMPENI

No. Responden : 07

Identitas Responden

Nama : Ismi Rami Aji

Pekerjaan : Buruh Tani (Ketua Kelompok)

Waktu dan tempat wawancara : Selasa, 28 Januari 2020 Bertempat di Rumah Ibu Ismi

No	Pernyataan	Deskripsi
1.	Apakah yang anda ketahui tentang FDS?	FDS itu pemberian materi kepada anggota kelompok dari pendamping mengenai masalah pendidikan anak, ekonomi, kesehatan, perlindungan anak, lansia dan disabilitas, FDS dilakukan pendamping kepada anggota setiap bulan.
2.	Apa pekerjaan sehari-hari Kepala Rumah Tangga?	Suami saya bekerja sebagai buruh tani sedangkan saya ibu rumah tangga.
3.	Berapa pengeluaran anda sehari-hari?	Ya tidak menentu karena hanya sebagai buruh biasa yang kalo ada yang nyuruh baru kerja, jadi pengeluaran ya paling tidak 50-100 rb sehari.
4.	Sudah berapa tahun anda mendapat mengikuti FDS?	Kalau tidak salah yaa, pas ada sekolah itu tahun 2014 an masih materi kesehatan dan gizi, kalo sekarang lebih lengkap lagi.
5.	Apa hak dan kewajiban anda sebagai Peserta FDS?	Hak sebagai Peserta PKH yaitu mendapat bantuan PKH secara rutin, mendapat layanan kesehatan dan pendidikan gratis. Kewajiban Peserta PKH harus selalu berangkat sekolah,

		aktif datang ke posyandu, datang ke pertemuan kelompok.
6.	Apa anda sudah mempraktkan modul PPA dalam kehidupan sehari-hari?	Sudah, misal kalo dulu saya ketika marah ke anak ya langsung aja marah dengan nada tinggi, kalo sekarang ketika marah ya saya tahan mbk tidak seperti dulu, terus ketika anak pulang sekolah saya mulai sadar agar lebih peduli dengan menanyakan bagaimana tadi di sekolah? Ya setidaknya saya walaupun tidak bisa bantu mengerjakan PR nya ya sekarang lebih perhatian kepada anak.
7.	Dalam modul ekonomi, apa yang sudah anda pahami, dan bagaimana anda menerapkan dalam kehidupan sehari-hari?	Yang saya ingat itu pendamping mengajarkan tentang bagaimana seorang ibu harus tau mana kebutuhan dan mana keinginan, terkadang saya pribadi sering kali mendahulukan keinginan terlebih dahulu dibandingkan dengan kebutuhan. kemudian pendampig juga mengajarkan pentingnya menabung dan memberikan kita PR agar menabung dan setiap kali FDS kita d suruh membawa tabungan kita masing-masing.
8.	Apakah anda sudah mempraktekan modul kesehatan dan gizi dalam pengaplikasian d rumah?	Untuk kesehatan saya lebih aktif ke posyandu karena sekarang lebih paham manfaat posyandu termasuk pada saat bulan pemberian vitamin untuk kekebalan dan baik tumbuh kembang anak.
9.	Kendala-kendala apa saja yang dialami dalam mengikuti kegiatan FDS di Desa Jagalempeni?	Terkadang anggota kelompok susah d ajak kumpul dengan berbagai alasan sibuk karena sedang jd buruh bawang dan pas jadwal jamiyahan, faktor malas, lainnya. Itu dalam tiap bulan pasti ada orang tertentu yang memang peserta itu susah. Meskipun jadwal sudah menyesuaikan dengan waktu peserta, artinya di jam yang memang semua peserta ada d rumah.
10.	Apa saran anda dalam mengatasi kendala yang dialami dalam kegiatan FDS Desa Jagalempeni?	Agar pendamping lebih tegas dalam melaksanakan tugasnya.

HASIL WAWANCARA DENGAN KPM DESA JAGALEMPENI

No. Responden : 08

Identitas Responden

Nama : Nurilah

Pekerjaan : Buruh Tani

Waktu dan tempat wawancara : Selasa, 28 Januari 2020 Bertempat di Rumah Ibu Nurilah

No	Pernyataan	Deskripsi
1.	Apakah yang anda ketahui tentang FDS?	FDS itu pemberian materi kepada anggota kelompok dari pendamping mengenai masalah pendidikan anak, ekonomi, kesehatan, perlindungan anak, lansia dan disabilitas, FDS dilakukan pendamping kepada anggota setiap bulan.
2.	Apa pekerjaan sehari-hari Kepala Rumah Tangga?	Suami saya bekerja sebagai buruh tani sedangkan saya ibu rumah tangga.
3.	Berapa pengeluaran anda sehari-hari?	Ya tidak menentu karena hanya sebagai buruh biasa yang kalo ada yang nyuruh baru kerja, jadi pengeluaran ya paling tidak 50-100 rb sehari.
4.	Sudah berapa tahun anda mendapat mengikuti FDS?	Kalau tidak salah yaa, pas ada sekolah itu tahun 2014 an masih materi kesehatan dan gizi, kalo sekarang lebih lengkap lagi.
5.	Apa hak dan kewajiban anda sebagai Peserta FDS?	Hak sebagai Peserta PKH yaitu mendapat bantuan PKH secara rutin, mendapat layanan kesehatan dan pendidikan gratis. Kewajiban Peserta PKH harus selalu berangkat sekolah, aktif datang ke posyandu, datang ke pertemuan kelompok.
6.	Apa anda sudah mempraktkan modul PPA dalam kehidupan sehari-hari?	Pelan-peran saya mulai merubah sikap saya, misal ketika menyuruh anak dengan kata tolong, dan sesudahnya saya bilang terimakasih. Dan ketika anak menunjukkan sikap baik pun saya mencoba mulai memuji perilaku baiknya, yang tadinya saya tidak paham

		kalau itu membawa dampak terhadap anak saya.
7.	Dalam modul ekonomi, apa yang sudah anda pahami, dan bagaimana anda menerapkan dalam kehidupan sehari-hari?	Lebih cermat dalam mengelola uang, karena pendapatan tidak pasti yaa mbak, jadi sekarang memang harus belajar biar bisa ngelola uang gitu.biar uang saya yang buat jualan pisang juga tidka kepakai, sering solanya saya jualan juga tapi tidak paham uangnya habis buat apa, modal kadang g balik.
8.	Apakah anda sudah mempraktekan modul kesehatan dan gizi dalam pengaplikasian d rumah?	Saya lebih memperhatikan apa yang kami makan sih mbk, ternyata memang g harus mahal yaa, tapi seimbang padahal saya kan jualan pisang yaa mbk, saya biasanya suka sayang kalo makan barang dagangan hehe, tapi semenjak sering kumpulan yaa makin sadar ternyata selama ini saya salah.
9.	Kendala-kendala apa saja yang dialami dalam mengikuti kegiatan FDS di Desa Jagalempeni?	Terkadang anggota kelompok susah d ajak kumpul dengan berbagai alasan sibuk karena sedang jd buruh bawang dan pas jadwal jamiyahan, faktor malas, lainnya
10.	Apa saran anda dalam mengatasi kendala yang dialami dalam kegiatan FDS Desa Jagalempeni?	Agar pendamping lebih tegas dalam melaksanakan tugasnya.

HASIL WAWANCARA DENGAN KPM DESA JAGALEMPENI

No. Responden : 09

Identitas Responden

Nama : Desi

Pekerjaan : Buruh Tani

Waktu dan tempat wawancara : Selasa, 28 Januari 2020 Bertempat di Rumah Ibu Desi

No	Pernyataan	Deskripsi
1.	Apakah yang anda ketahui tentang FDS?	FDS itu pemberian materi kepada anggota kelompok dari pendamping mengenai masalah pendidikan anak, ekonomi, kesehatan, perlindungan anak, lansia dan disabilitas, FDS dilakukan pendamping kepada anggota setiap bulan.
2.	Apa pekerjaan sehari-hari Kepala Rumah Tangga?	Suami saya bekerja sebagai buruh tani sedangkan saya ibu rumah tangga.
3.	Berapa pengeluaran anda sehari-hari?	Ya tidak menentu karena hanya sebagai buruh biasa yang kalo ada yang nyuruh baru kerja, jadi pengeluaran ya paling tidak 50-100 rb sehari.
4.	Sudah berapa tahun anda mendapat mengikuti FDS?	Kalau tidak salah yaa, pas ada sekolah itu tahun 2014 an masih materi kesehatan dan gizi, kalo sekarang lebih lengkap lagi.
5.	Apa hak dan kewajiban anda sebagai Peserta FDS?	Hak sebagai Peserta PKH yaitu mendapat bantuan PKH secara rutin, mendapat layanan kesehatan dan pendidikan gratis. Kewajiban Peserta PKH harus selalu berangkat sekolah, aktif datang ke posyandu, datang ke pertemuan kelompok.
6.	Apa anda sudah mempraktkan modul PPA dalam kehidupan sehari-hari?	Saya sudah melatih membiasakan diri ketika lagi masak, anak saya perempuan mbak, kembar dua, jadi saya biarkan mereka membantu saya mengupas bawang, sambil berhitung dan mereka memang abru 1.5 tahun mbak, tapi berpengaruh banget ketika kita

		melibatkan anak-anak sambil membereskan pekerjaan rumah, sambil menemani mereka belajar juga.
7.	Dalam modul ekonomi, apa yang sudah anda pahami, dan bagaimana anda menerapkan dalam kehidupan sehari-hari?	Saya berusaha mempraktikkan hemat dalam berbelanja, mulai merinci pengeluaran saya sebulan, yaa pengetahuan aja, karena selama ini malas mencatat ya mbak, kdang sampe bingung , uang saya habis buat apa aja.
8.	Apakah anda sudah mempraktekan modul kesehatan dan gizi dalam pengaplikasian di rumah?	Karena saya punya anak kembar, jadi saya memang harus rajin ke posyandu untuk mengecek perkembangan anak saya, terlebih sering diingatkan pewart perkumpulan, jadi memang saya harus perhatian k anak masalah kesehatan
9.	Kendala-kendala apa saja yang dialami dalam mengikuti kegiatan FDS di Desa Jagalempeni?	Terkadang anggota kelompok susah di ajak kumpul dengan berbagai alasan sibuk karena sedang jd buruh bawang dan pas jadwal jamiyahan, faktor malas, lainnya
10.	Apa saran anda dalam mengatasi kendala yang dialami dalam kegiatan FDS Desa Jagalempeni?	Agar pendamping lebih tegas dalam melaksanakan tugasnya.

HASIL WAWANCARA DENGAN KPM DESA JAGALEMPENI

No. Responden : 10

Identitas Responden

Nama : Saronah

Pekerjaan : Buruh Tani

Waktu dan tempat wawancara : Selasa, 28 Januari 2020 Bertempat di Rumah Ibu Saronah

No	Pernyataan	Deskripsi
1.	Apakah yang anda ketahui tentang FDS?	FDS itu pemberian materi kepada anggota kelompok dari pendamping mengenai masalah pendidikan anak, ekonomi, kesehatan, perlindungan anak, lansia dan disabilitas, FDS dilakukan pendamping kepada anggota setiap bulan.
2.	Apa pekerjaan sehari-hari Kepala Rumah Tangga?	Suami saya bekerja sebagai buruh tani sedangkan saya ibu rumah tangga.
3.	Berapa pengeluaran anda sehari-hari?	Ya tidak menentu karena hanya sebagai buruh biasa yang kalo ada yang nyuruh baru kerja, jadi pengeluaran ya paling tidak 50-100 rb sehari.
4.	Sudah berapa tahun anda mendapat mengikuti FDS?	Kalau tidak salah yaa, pas ada sekolah itu tahun 2014 an masih materi kesehatan dan gizi, kalo sekarang lebih lengkap lagi.
5.	Apa hak dan kewajiban anda sebagai Peserta FDS?	Hak sebagai Peserta PKH yaitu mendapat bantuan PKH secara rutin, mendapat layanan kesehatan dan pendidikan gratis. Kewajiban Peserta PKH harus selalu berangkat sekolah, aktif datang ke posyandu, datang ke pertemuan kelompok.
6.	Apa anda sudah mempraktkan modul PPA dalam kehidupan sehari-hari?	Saya selama ini memang berusaha selalu mendampingi anak saya belajar, meskipun banyak g taunya ketika anak tanya, tetapi setidaknya saya tau proses anak saya belajar, Alhamdulillah mbak, anak saya selalu mendapat peringkat. dan memang bagus sih yang diajarkan di FDS itu, saya mulai pelan-pelan merubah terutama ketika tahan

		emosi yaa mbk, biasa kita suka g sadar mungkin melalukan kekerasan fisik.
7.	Dalam modul ekonomi, apa yang sudah anda pahami, dan bagaimana anda menerapkan dalam kehidupan sehari-hari?	Yang aya pahami itu tentang pentingnya menabung, karena selama ini ketika ada anak sakit, sya bingung karena tidak punya tabungan untuk itu, tapi sekrang jauh lebih hemat lagi, ngitung-ngitung lagi mana yang sebenarnya kita perlu beli mana yang hanya keinginan sesaat saja. Gitu sih mbak.
8.	Apakah anda sudah mempraktekan modul kesehatan dan gizi dalam pengaplikasian d rumah?	Alhamdulillah sudah mbak, kebetulan saya aktif di posyandu sebagai kader posyandu, Jadi ilmu yang saya dapat dari kumpulan bulanan, sama ketika bidan mengkader kami, memberikan pengetahuan tentang kesehatan, pentingnya mejaga kesebersihan dan ngajak ibu-ibu sekitar agar tidak membuang sampah sembarangan.
9.	Kendala-kendala apa saja yang dialami dalam mengikuti kegiatan FDS di Desa Jagalempeni?	Terkadang anggota kelompok susah d ajak kumpul dengan berbagai alasan sibuk karena sedang jd buruh bawang dan pas jadwal jamiyahan, faktor malas, lainnya
10.	Apa saran anda dalam mengatasi kendala yang dialami dalam kegiatan FDS Desa Jagalempeni?	Agar pendamping lebih tegas dalam melaksanakan tugasnya.

Lampiran 2



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PASCASARJANA
Gedung A, Kampus Pascasarjana, Jl. Kelud Utara III, Semarang 50237
Telepon +6224-8440516, 8449017, Faksimile +6224-8449969
Laman: <http://pps.unnes.ac.id>, surel: pascasarjana@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/16631/UN37.2/LT/2019
Hal : Izin Penelitian

26 Desember 2019

Yth. Ketua Koordinator PPKH Kab.Brebes

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Iis Arfiyani, S.sos
NIM : 0105517002
Program Studi : Pendidikan Luar Sekolah, S2
Semester : Gasal
Tahun akademik : 2019/2020
Judul : STRATEGI FAMILY DEVELOPMENT SESSION DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA JAGALEMPENI
KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian Tesis di Perusahaan atau Instansi yang Saudara Pimpin, dengan alokasi waktu 26 Desember 2019 s.d 26 Maret 2020.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Pascasarjana
Wakil Direktur Bid. Akademik dan
Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Ida Zulaeha, M.Hum.
NIP. 197001091994032001

Tembusan:
Direktur Pascasarjana;
Universitas Negeri Semarang



Ministry of Education and Culture - UNNES (2019-12-27 9:45:09)

Sistem Informasi Surat Dinas - UNNES (2019-12-27 9:45:09)

Lampiran 3



**PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PPKH)
KECAMATAN WANASARI**

**SEKRETARIAT : KANTOR KEC. WANASARI JALAN RAYA KLAMPOK
WANASARI – BREBES**

PROGRAM
KELUARGA
HARAPAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, pendamping Sosial PKH kecamatan Wanasari desa
dampingan Jagalempeni, Kabupaten Brebes menerangkan bahwa:

Nama : 1. Sutrisno
2. NurulKhotimah
3. SitiSudiarti

Menerangkan;

Nama : IIS ARFIYANI
Tempat/TglLahir : Brebes, 27 April 1993
NIM : 0105517002
Program Studi : PendidikanLuarSekolah, S2
Semester : Gasal
Alamat : Songgom, KecamatanSonggom, Kab. Brebes

Telahlakukanpenelitian di Desa Jagalempeni Kec.Wanasari Kab. Brebes guna melengkapi
data penyusunanTesis yang berjudul "STRATEGY FAMILY DEVELOPMENT SESSION
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA JAGALEMPENI KECAMATAN
WANASARI KABUPATEN BREBES"

Demikian surat keterangan ini di buat tuntuk di pergunakan dengan semestinya.

Jagalempeni, 30 Januari 2020
PendampingSosial DesaJagalempeni


Nurul Khotimah

Lampiran 4



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS SOSIAL
Jl. P. Diponegoro No. 150 Telp./Fax : (0283) 671322
BREBES 52221

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Hendrik Maulana,S.Sos.I
Jabatan : Koordinator PPKH Kabupaten Brebes

Menerangkan bahwa

Nama : Iis Arfiyani
Tempat/TglLahir : Brebes, 27 April 1993
NIM : 0105517002

Telah melakukan penelitian di Desa Jagalempeni Kec.Wanasari Kab. Brebes guna melengkapi data penyusunanTesis yang berjudul "STRATEGY FAMILY DEVELOPMENT SESSION DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA JAGALEMPENI KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES"

Demikian surat keterangan ini di buat tuntut di pergunkan sebagaimana mestinya

Brebes, 30 Januari 2020

Koordinator PPKH Kab.Brebes


Hendrik Maulana,S.Sos.I



Lampiran 5



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN WANASARI
DESA JAGALEMPENI

Alamat: Jl. Raya Jagalempeni No.08 Jagalempeni-Wanasari-Brebes Telp.(0263)3297130 Kode Pos 52252

SURAT KETERANGAN

Nomor : 142.41 / 02/1/2020

Yang bertanda tangan di bawah Kepala Desa Jagalempeni Kec.Wanasari Kab. Brebes, menerangkan bahwa :

Nama : Moh. Taufiq
 Jabatan : YMT Sekretaris Desa
 Alamat : Jagalempeni Kec. Wanasari Kab. Brebes

Menerangkan ;

Nama : IIS ARFIYANI
 Tempat/tgl Lahir : Brebes, 27 April 1993
 NIM : 0105517002
 Program Studi : pendidikan Luar Sekolah, S2
 Semester : Gasal
 Alamat : Songgom Kec. Songgom Kab . Brebes

Telah Melakukan Penelitian di Balai Desa Jagalempeni Kec. Wanasari Kab. Brebes guna melengkapi data Penyusunan Tesis yang berjudul " STRATEGI FAMILY DEVELOPMENT SESSION DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA JAGALEMPENI KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES "

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di pergunakan dengan semestinya

Jagalempeni , 09 Januari 2020

An. Kepala Desa Jagalempeni

YMT Sekretaris Desa



MCH. TAUFIQ

Lampiran 6

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Bidan Desa Jagalempeni, Kabupaten Brebes menerangkan bahwa:

Nama : Patmawati,S.ST
Menerangkan;
Nama : IIS ARFIYANI
Tempat/TglLahir : Brebes, 27 April 1993
NIM : 0105517002
Program Studi : Pendidikan Luar Sekolah, S2
Semester : Gasal
Alamat : Songgom, KecamatanSonggom, Kab. Brebes

Telah melakukan penelitian di Desa Jagalempeni Kec.Wanasari Kab. Brebes guna melengkapi data penyusunan Tesis yang berjudul "STRATEGY FAMILY DEVELOPMENT SESSION DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA JAGALEMPENI KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES"

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan dengan semestinya.

Jagalempeni, 6 Januari 2020



Patmawati S.ST

Lampiran 7



GRADUASI KPM DESA JAGALEMPENI



WAWANCARA DENGAN KPM DESA
JAGALEMPENI



WAWANCARA DENGAN KETUA KPM DESA
JAGALEMPENI



WAWANCARA DI SALAH SATU FASILITAS
PENDIDIKAN KPM DESA JAGALEMPENI



PERTEMUA KELOMPOK KPM DESA
JAGALEMPENI



WAWANCARA DENGAN BIDAN DESA
JAGALEMPENI



PERTEMUAN BULANAN KPM DESA JAGALEMPENI



WAWANCARA DENGAN KADES DESA JAGALEMPENI